

**PELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PADA MAHKAMAH RENDAH SYARIAH  
SANDAKAN SABAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam ( SHI )**



**OLEH :**

**SUHANAH BINTI ABD RAHMAN  
NIM : 10721000256**

**PROGRAM S 1**

**JURUSAN AKHWAL SYAKSIYYAH ( AH )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011 M**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN ( STUDI KASUS PADA MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SANDAKAN SABAH )”**. Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum tempat dimana penulis menimba pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, Indonesia.

Dari penjelasan diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai, apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dan bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus terhadap anak setelah orang tua bercerai menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan, Sabah. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat yang mengajukan dan menyelesaikan kasus tentang nafkah anak, hakim serta staf di Mahkamah Syariah dan sumber data skunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pelbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai dan pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai menurut hukum Islam. Dengan metode pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu digambarkan melalui kata-kata dengan teknik penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Dari penelitian ini dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah tentang pemberian nafkah terhadap anak sesuai hukum syara' tetapi belum berjalan dengan semestinya dan tepat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan dan pembayaran nafkah terhadap anak setelah perceraian.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pembatasan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tujuan Penelitian dan Manfaat.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>

### **BAB II                    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

<b>A. Tinjauan Historis.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Misi, Visi, Objektif dan Tujuan Kehakiman Syariah Negeri     Sabah.....</b>	<b>20</b>
<b>C. Kewenangan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan.....</b>	<b>23</b>
<b>D. Struktur Organisasi.....</b>	<b>25</b>

### **BAB III                    NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM**

<b>A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Kewajiban Memberi Nafkah.....</b>	<b>34</b>

C. Nafkah Dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri	
Sabah.....	43

**BAB IV      PELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN**  
**(STUDI KASUS PADA MAHKAMAH RENDAH SYARIAH**  
**SANDAKAN SABAH)**

A. Pelaksanaan Putusan.....	46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Putusan.....	58
C. Analisis Hukum Islam.....	63

**BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

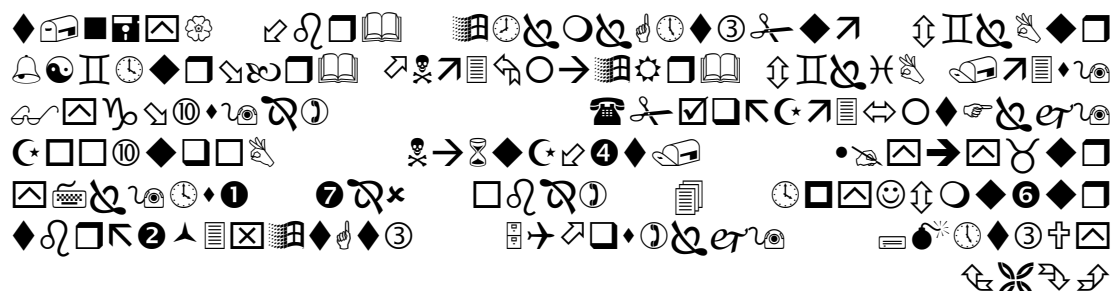
# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga. Ini bertujuan untuk menyusun pergaulan antara pria dan wanita supaya pasangan itu dapat mewujudkan suasana berkasih sayang yang memperindah kehidupan<sup>1</sup>.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ia merupakan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah<sup>2</sup>. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21 :



Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, Bahawa ia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya Yang demikian itu

---

<sup>1</sup> Syeikh Ghazali Hj Abd Rahman, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, (Malaysia : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1997), h.ix

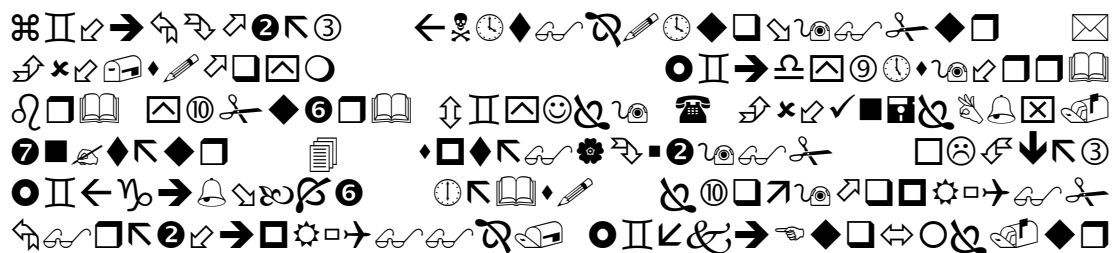
<sup>2</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), cet 1, h.13

*mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang Yang berfikir<sup>3</sup>*

Dari ayat di atas jelas menyatakan bahwa dengan melakukan perkawinan akan membuat hati menjadi tenteram (sakinah ) dan pada akhirnya membawa ketenteraman kepada seluruh anggota keluarga.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya.

Dasarnya dalam Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 233 :



.....

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya<sup>4</sup>*

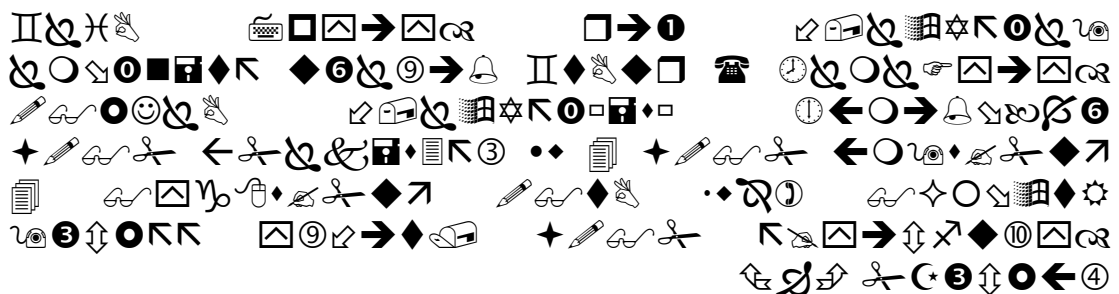
Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa suami bertanggungjawab terhadap nafkah istri dan anaknya, baik jasmani maupun rohani dan suami sangat menanggung dosa akibat kelalaiannya memberikan nafkah.

Menurut pengamatan penulis terdapat satu aspek ajaran Islam yang kurang diperhatikan oleh masyarakat di Sandakan, Sabah yakni tanggungjawab orang tua

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.572.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.47.

terhadap anak setelah perceraian. Padahal anak merupakan nikmat dan amanah dari Allah, tentu anak yang hidup sama seperti manusia lainnya memerlukan berbagai macam kebutuhan baik merupakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun pendidikan. Setiap orang tua harus menjaga dan merawat anaknya karena anak merupakan amanah dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam al-Quran pada surah at-Thalaq ayat 7 :



*Hendaklah orang Yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa Yang di sempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa Yang diberikan Allah kepadanya (sekadar Yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) Yang diberikan Allah kepadaNya. (orang-orang Yang Dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan<sup>5</sup>.*

Selanjutnya Rasulullah saw juga memberi petunjuk dalam sabdanya :

عن ابي مسعود الانصار رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم : قال اذا انفق المسلم نفقه على اهله وهو يحتسبها عانة له صدقه (رواه البخارى)

*Diriwayatkan dari Abu Mas`ud al-Anshory r.a : Nabi s.a.w pernah bersabda, ketika seorang muslim membelanjakan ( mengeluarkan ) sesuatu untuk keluarganya dengan niat memperoleh redho Allah, maka apa yang dikeluarkan untuk keluarganya dinilai sebagai sedekah". ( H.R. Bukhary )<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.817.

<sup>6</sup> M.Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2008), cet.1, h.590.



Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat diketahui betapa orang tua bertanggungjawab terhadap pemenuhan nafkah anak baik secara rohani maupun jasmani. Baik buruknya masa depan anak sangat tergantung dari kebijakan orang tua dalam pemeliharannya. Anak sebagai manusia adalah makhluk yang menghadapi banyak macam kebutuhan dalam hidupnya baik jasmani dan rohani<sup>7</sup> Nafkah adalah keperluan hidup seperti rumah, pakaian, makanan, pendidikan, kenikmatan keamanan dan lain-lainnya termasuk belanja sehari-hari yang wajib dipenuhi oleh sang ayah sesuai dengan kemampuannya<sup>8</sup>. Nafkah yang wajib dipenuhi terhadap anak perempuannya adalah sampai ia bersuami sedangkan untuk anak laki-laki sampai berdiri sendiri. Hal ini merupakan tanggungjawab orang tua (ayah) terhadap anaknya dalam memberikan kesejahteraan hidup anak itu sendiri sehingga ia mampu untuk mandiri<sup>9</sup>.

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, ( Bandung: Mizan 1993 ) cet.ke 2, h.197.

<sup>8</sup> Zakiyah Daradjat, dkk. *Agama Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1984 ), Cet. Ke-1. h.8

<sup>9</sup> *Ibid*

Peristiwa perceraian apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya<sup>10</sup>.

Dalam Islam, perceraian merupakan hal yang tidak disukai meskipun dibolehkan dengan alasan yang benar

Menurut ulama Hanafiyyah dan Hambali, darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya. Sebab soal hati hanya terletak dalam genggamannya Allah. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri. Maka kufur itu dibenci dan terlarang<sup>11</sup>.

Di Sandakan Sabah banyak orang tua yang tidak membayar nafkah kepada anak mereka ini kerana suami terlalu keras dengan sikapnya dan terlalu mengikut kehendak diri bahkan bisa saja menyebabkan si isteri menderita secara tidak langsung

---

<sup>10</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ( Jakarta : 2004 )Cet-2

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ( Bandung : Al-Ma`arif,1994 ), Cet.Ke-9,Jilid 8

melibatkan anak-anak yang tidak mengerti permasalahan yang terjadi antara ibu dan bapa menjadi korban. Secara tidak langsung bapak itu sendiri melakukan kezaliman ke atas mereka yang tidak berdosa. Mereka seperti tidak tahu hukum agama dan takutkan tuhan<sup>12</sup>

Adapun fakta yang terlihat di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus perceraian adalah suami seolah terlepas dari tanggungjawabnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Antara kasus-kasus yang terdapat di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan yaitu kasus (KES MAL NO 12002-024-0063 THN 2010) Puan Sarmilah Binti Damit (Plaintif)<sup>13</sup> lawan Herman Bin Razali (Defenden)<sup>14</sup> mengenai tuntutan nafkah anak. Plaintif dan juga defenden telah berkahwin pada 3 Ogos 2006 bertempat di batu 4 Sandakan. Mereka telah berkawin secara sah dengan menggunakan wali nasab bapa kepada Plaintif. Mereka berdua telah ditetapkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan pada 26 Ogos 2009 dengan talak satu. Dalam penyata tuntutan plaintif telah mendakwa bahawa bekas suaminya yaitu Defenden tidak pernah memberi nafkah kepada anak bermula dari tarikh mereka berdua bercerai sehingga kes ini didaftarkan. Selain itu juga, plaintif juga mendakwa defenden tidak pernah memenuhi keperluan anak

---

<sup>12</sup> <http://www.ehomemakers.net.berita> *harian online*, jumaat, 12 nov 2010

<sup>13</sup> Plaintif adalah penggugat

<sup>14</sup> Defenden adalah tergugat

seperti pakaian, makan, dan perubatan anak mereka berdua. Oleh yang demikian Plaintiff menuntut nafkah diberikan kepada anak tersebut sebanyak RM 300 sebulan<sup>15</sup>.

Pada putusan hakim : setelah mahkamah memanggil dan juga mengambil keterangan saksi-saksi dan mahkamah berpuas hati atas keterangan tersebut, mahkamah telah membuat keputusan seperti berikut : Dibuktikan bahwa selepas perceraian anak telah dijaga oleh Plaintiff. Dalam tempoh itu juga dibuktikan bahwa defenden telah cuai memperuntukkan nafkah anak yang telah dijaga oleh Plaintiff. Oleh itu defenden hendaklah membayar nafkah semasa anak dengan kadar RM300 sebulan bermula pada bulan februari 2010. Nafkah yang tertunggak boleh dibayar secara ansuran dengan kadar RM 100 sebulan.

Selain itu terdapat ada juga kasus lain yaitu kasus (KES MAL NO 12002-024-0120 THN 2010) Puan Arsinah ( Plaintiff ) lawan Nurdin ( Defenden ) Plaintiff dan Defenden telah berkahwin pada 2006 bertempat di Sandakan. Mereka telah berkahwin secara sah dengan menggunakan wali nasab bapa kepada Plaintiff. Mereka berdua telah ditetapkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan pada 14 October 2009 dengan talak satu. Dalam penyata tuntutan Plaintiff telah mendakwa bahwa bekas suaminya yaitu defenden tidak pernah memberi nafkah kepada anak bermula dari bulan oktober 2009 sehingga kes ini didaftarkan. Selain itu juga plaintiff juga mendakwa segala perbelanjaan anak ditanggung seorang oleh plaintiff. Oleh yang

---

<sup>15</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL NO 12002-024-0063 THN 2010, 14 Jun 2010.

demikian plaintif menuntut nafkah diberikan kepada anak tersebut sebanyak RM450 sebulan<sup>16</sup>

Pada putusan hakim : mahkamah telah memutuskan bahwa defenden perlu membayar kepada plaintif sebanyak RM450 sebulan secara tunai. Perintah berkuatkuasa serta merta dan bermula hari pertama pada bulan hadapan sehingga anak berumur 18 tahun. Namun begitu pada 15 desember 2009 plaintif telah memfailkan semula permohonan untuk penguatkuasaan perintah. Dalam penyata tuntutan, plaintif telah mendakwa walaupun telah diperintah oleh pihak mahkamah untuk membayar nafkah semasa anak kepada plaintif namun defenden tidak pernah membayar nafkah tersebut dari mula perintah nafkah berkuatkuasa hingga kes yang baru ini difailkan. Selain itu juga plaintif memohon kepada mahkamah supaya defenden membayar tunggakan nafkah anak secara memasukkan ke dalam akaun Maybank Pemohon No Akaun 160166074024 sebanyak RM 3,600.

Merujuk kepada ayat yang dipaparkan di atas, maka kasus yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan seolah terjadi kontradiksi. Fakta yang terlihat di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan ini menunjukkan banyak suami yang telah menceraikan istrinya tidak lagi memberikan perhatian kepada anaknya khususnya tentang nafkah.

---

<sup>16</sup> Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL NO 12002-024-0120 THN 2010, 16 Mac 2010

Beranjak dari fakta tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengenai tanggungjawab suami terhadap anak setelah perceraian. Oleh itu penulis akan membahaskan permasalahan ini dan menjadikannya sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN ( STUDI KASUS PADA MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SANDAKAN SABAH )**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis membatasi lingkup permasalahannya kepada kasus nafkah anak setelah perceraian. Penulis hanya meneliti perkara yang sudah diputuskan hakim ( *yurisprudensi* ) dari Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah pada tahun 2010.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan?

3. Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai menurut hukum Islam?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Tujuan penelitian untuk memperjelaskan sasaran yang akan dapat dicapai melalui penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai menurut hukum Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa Jurusan Ahwalul Syaksiyyah khususnya dan mahasiswa UIN SUSKA RIAU pada umumnya.

2. Penelitian ini akan memperluaskan wawasan intelektualitas kepada umat Islam, para pelaku akademik dibidang hukum terutamanya kasus tinjauan umat islam dan undang-undang terhadap nafkah anak.
3. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi penulisan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA, Pekanbaru Riau.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan lokasi penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research ) dan mengambil lokasi penelitian di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah, untuk menyelesaikan dan menetapkan putusan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara yang beragama Islam.

##### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah masyarakat yang mengajukan dan menyelesaikan kasus tentang nafkah anak, hakim serta staf di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan. Sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai.

##### **3. Populasi dan Sampel**



Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2010 sejumlah 51 orang, dan karyawan, pegawai-pegawai yang bekerja di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan 10 orang. Oleh karena populasinya terlalu banyak, maka penulis mengambil sampel sebesar 14 persen, dalam 7 kasus dengan mengambil teknik *Random Sampling*. Hal ini disebabkan semua kasus yang ada itu hampir bersamaan.

#### 4. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat yang mengajukan dan menyelesaikan kasus tentang nafkah anak, hakim serta staf di Mahkamah Syariah.
2. Data Sekunder, yaitu data-data dari buku-buku, dokumen, arsip yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut :

- A. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- B. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan.

- C. Kepustakaan yaitu penulis menelaah buku-buku yang berhubungan dengan nafkah anak.

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, dipergunakan metode analisis data yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan observasi dideskripsikan sedemikian rupa baik melalui perbandingan data-data tersebut maupun dengan menggunakan pendekatan teori konsep maupun dengan pendapat para ahli. Sehingga akan diperoleh gambaran yang menyangkut tentang masalah yang diteliti.

## 7. Teknik Penulisan.

Setelah data yang terkumpul di analisa, maka penulis mendeskripsikan data gejala-gejala yang tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Induktif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, dianalisa, kemudian di ambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian di bahas dan di ambil secara khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan mudah untuk difahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama penulis awali dengan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis paparkan gambaran umum lokasi penelitian, yang berisikan tinjauan historis, misi, visi, objektif dan tujuan kehakiman syariah Negeri Sabah, kewenangan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan serta struktur organisasi karyawan yang bertugas di mahkamah.

Seterusnya pada bab ketiga dilanjutkan tentang nafkah menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian nafkah dan dasar hukum, kewajiban memberi nafkah serta nafkah dalam undang-undang keluarga Islam negeri Sabah.

Untuk bab keempat dilanjutkan lagi tentang pelaksanaan putusan mahkamah rendah syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dan pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai menurut hukum Islam.

Pada bab terakhir yaitu bab kelima adalah kesimpulan dan saran, yang merupakan bagian terakhir hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Tinjauan Historis

Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan '**saba**' yaitu **sejenis buah pisang** yang dipanggil pisang saba oleh masyarakat kaum Suluk (Sulu), yang sangat popular dibuat pisang goreng. Pisang saba ini juga dikenali sebagai pisang jaba oleh sekelompok masyarakat Bajau. Negeri ini disebut sebagai Sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat negeri Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan<sup>17</sup>.

Sandakan terletak di kedudukan 5° 30" Utara sehingga ke 6° 17" ke Utara, manakala di kedudukan garis bujur adalah 117° 37" Timur sehinggalah 118° 21" Timur. Sandakan merupakan bandar di negara Malaysia yang paling ke timur dari aspek garis lintang dan bandar yang terletak paling ke timur bagi negeri Sabah. Bandar Sandakan juga terletak kira-kira 1,900 kilometer dari Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia dan hanya kira-kira 28 kilometer dari sempadan negara Filipina. Bandar Sandakan telah wujud sebagai sebuah residensi semenjak tahun 1948.

---

<sup>17</sup> <http://hadeif.blogspot.com/2008/04/sejarah-negeri-sabah.html>

Mengikut catatan Sejarah, nama Sandakan berasal daripada perkataan Sulu iaitu “SANDAK” bererti “*pajak gadai*”. Jadi pengertian keseluruhannya adalah “bandar yang di pajak gadai”<sup>18</sup>.

Pada tahun 1948, ordinan Mahkamah Persekutuan dan sistem kehakiman persekutuan memisahkan Mahkamah Rendah Syariah dari hieraki Mahkamah. Pada masa pemerintahan kuasa asing, segala urusan agama diberi kuasa kepada raja-raja Melayu tetapi terhadap bidang yang terbatas seperti perkawinan, adat istiadat, dan agama. Pada tahun 1952, negeri Selangor Darul Ehsan yang mula-mula sekali mewujudkan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak, kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain di Malaysia Barat<sup>19</sup>.

Sultan adalah sebagai Ketua Agama dan mempunyai bidang kuasa perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal agama Islam. Keadaan ini diamalkan sejak sebelum merdeka lagi. Sultan bagi setiap negeri di Malaysia dilantik sebagai Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam.

Bagi negeri yang tidak mempunyai institusi beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Wilayah dan Agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran agama Islam ialah Yang Di Pertua Agung.

Mahkamah Syariah dinamakan Mahkamah Kadi bagi menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri ditubuhkan sebuah Jabatan Agama Islam untuk mentadbir

---

<sup>18</sup> <http://www.sabah.org.my/bm/daerah/daerah/sdk/sandakan/umum/umum.htm>

<sup>19</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 09 Feb 2011.

perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran agama Islam. Mahkamah Syariah adalah satu badan penting yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam pada setiap negeri. Mahkamah Syariah juga ditubuhkan di setiap daerah bagi kebanyakan negeri untuk memudahkan lagi menjalankan pentadbiran agama Islam. Ketua bagi setiap daerah berkenaan dilantik seorang Kadi Daerah<sup>20</sup>.

Adapun pada bidang kuasa Jabatan Agama Islam dan Mahkamah Rendah Syariah pula, Mahkamah Syariah diberi nama Mahkamah Kadi (dahulunya sebelum pemisahan antara dua agensi ini berlaku) telah diberi kuasa menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkawinan, perceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil.

Mahkamah Syariah menjalankan tugas yang berasingan dengan Pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat, Baitulmal, Dakwah, Pendidikan, Pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap negeri berkenaan di Malaysia. Pada masa kini semua Mahkamah Syariah telah terpisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitاسnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi (pembuat dasar)

---

<sup>20</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas 09 Feb 2011.

dan diikuti Majlis Agama & Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam<sup>21</sup>.

Adapun perlembagaan Malaysia 1965 Kuasa Mahkamah Syariah diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1965 adalah seperti berikut :

1. Boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau sanksi ke atas orang Islam sahaja.
2. Sanksi tidak melebihi RM1000.00 sahaja atau
3. 6 bulan penjara atau
4. Gabungan kedua-duanya (sanksi dan penjara)<sup>22</sup>.

Tambahan dengan Perlembagaan Malaysia 1984 Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1984 dengan pindaan adalah seperti berikut :

1. Boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau sanksi ke atas orang Islam sahaja
2. Sanksi tidak melebihi RM5000.00 sahaja atau
3. 3 tahun penjara atau
4. Hukuman rotan tidak melebihi daripada enam kali sebatan atau
5. Gabungan ketiga-tiganya(sanksi, penjara atau rotan)<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup>Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 09 Feb 2011.

<sup>22</sup> Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas, 09 Feb 2011

<sup>23</sup> *Ibid* 09 Feb 2011



Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah merupakan salah satu Daerah yang terletak di Negeri Sabah Di Bawah Bayu. Telah bangunnya Mahkamah ini semenjak tahun 1978 lagi, sebelum ini apa-apa urusan tentang yang berkaitan dengan perbicaraan, masyarakat disini harus berurusan dengan Mahkamah ini terletak di tengah-tengah Kota Sandakan, Mahkamah ini beralamat “Mahkamah Rendah Syariah Sandakan, Banguna Urusetia Negeri, Peti Surat 3317, 90737 Sandakan Sabah.

Mahkamah ini mempunyai 8 orang pekerja, yang di anggotai seorang Hakim, dan 7 orang karyawan, antara jawatan yang di jawat di dalam Mahkamah itu adalah, Pembantu Pendaftar, Penolong Pendaftar, Penghantar Notis, Pembantu Am Rendah, Pembantu Tadbir, Pegawai Sulh<sup>24</sup>.

Enakmen ini mempunyai 135 enakmen yang merangkumi semua aspek Keluarga Islam dan merupakan pengkanunan Undang-undang yang diadaptasi daripada fiqh munakahat itu sendiri. Dalam Enakmen ini perkara yang berhubungan dengan perkawinan mempunyai 9 Enakmen sahaja. Dalam hal ini maka sudah tentu tidak merangkumi secara sempurna masalah-masalah keluarga. Dengan adanya Enakmen Undang-undang ini, pentadbiran Undang-undang keluarga Islam menjadi lebih kemas dan teratur<sup>25</sup>.

## **B. Misi, Visi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah**

Adapun Misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah adalah :

---

<sup>24</sup>En.Hanif, (Pegawai Penolong Pendaftar) *wawancara* di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan,

<sup>25</sup> En.Roshdan Hazimi, ( Pembantu Pendaftar) *wawancara* di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan,

Melaksanakan pengadilan, pengurusan mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara professional, berkesan dan sistematik berasaskan hokum syara' dan peruntukan undang-undang, untuk mencapai keredhaan Allah<sup>26</sup>.

Visi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah adalah :

Menjadi institusi kehakiman syariah yang berwibawa<sup>27</sup>.

Adapun objektif Mahkamah Rendah Syariah Sandakan adalah:

1. Menyegerakan pengendalian kes-kes Syariah dengan adil, teratur dan berkesan
2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai / kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan
3. Melaksanakan dengan berkesan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pentadbiran
4. Menyedia dan mempertingkatkan kemudahan infrastruktur yang mencukupi dan terbaik.

Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah adalah:

1. Mengurus kes-kes mal (termasuk pembahagian harta pusaka atau faraid dan hal-hal yang berkaitan dengannya) dalam bidangkuasa dari peringkat pendaftaran, penyediaan kes, sebutan atau pra-bicara, perbicaraan, pengurusan perintah, pelaksanaan perintah dan pengurusan rayuan

---

<sup>26</sup>Brosur yang diperdapat di Profil Jabatan Kehakiman Syar iah Negeri Sabah (Sabah:2010)

<sup>27</sup>Brosur yang diperdapat di Profil Jabatan Kehakiman Syar iah Negeri Sabah (Sabah:2010)

2. Mengendalikan kes-kes jenayah Syariah dalam bidang kuasa dari peringkat pendaftaran, penyediaan kes, sebutan atau pra-bicara, perbicaraan, pengurusan perintah, pelaksanaan hukuman/perintah dan rayuan<sup>28</sup>

Begitu juga dengan tujuan dan peranan Jabatan Kehakiman adalah:

1. Mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada mahkamah ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah s.w.t berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.
2. Menjalankan pentadbiran agama Islam al-Quran dan as-Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam daripada pepecahan dan keruntuhan rumahtangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasihat serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
6. Memberi bimbingan dan nasihat kaunseling kepada pasangan yang ingin berumahtangga agar dapat membina rumahtangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat membuat rayuan daripada pihak isteri untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya yang sudah bercerai

---

<sup>28</sup> Brosur yang diperdapat di Profil Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (Sabah:2010)

8. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kahwin, penceraian, talak, fasakh, dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat, dan lain-lain perkara mungkar
10. Membantu serta menyelesaikan pembahagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan seperti wasiat
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh kerajaan
12. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan sentiasa berdakwah sepanjang masa
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka<sup>29</sup>.

### **C. Kewenangan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan**

Cara pelaksanaan di Mahkamah Syariah ada tiga cara, antaranya adalah Mahkamah Rendah Syariah perlaksanaannya adalah:

1. Membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam yang boleh dihukum di bawah Enakmen Majlis Ugama Islam Sabah 2004 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan yang mana hukuman maksimum yang diperuntukkan tidak

---

<sup>29</sup>Mahkamah Syariah di Malaysia, *Wikipedia Bahasa Melayu*, Ensiklopedia Bebas 09 Feb 2011

melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama mana tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan baginya.

2. Mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding kes mal yang mana jumlah atau nilai perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi tiga ratus ringgit atau yang tidak dapat dianggarkan dengan wang<sup>30</sup>.

Selain daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga mempunyai cara pelaksanaannya tersendiri, antaranya adalah :

1. Membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah Enakmen Majlis Ugama Islam Sabah 2004, atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang memberi kepada Mahkamah Tinggi Syariah bidangkuasa untuk membicara apa-apa kesalahan.
2. Mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding kes mal dalam bidangkuasanya yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi tiga ratus ribu ringgit.
3. Mengawasi perjalanan prosiding kes-kes di Mahkamah-mahkamah Rendah Syariah dan boleh memanggil rekod kes-kes berkenaan dalam menjalankan bidangkuasa semakannya.
4. Mendengar rayuan kes-kes Mahkamah Rendah Syariah yang dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Brosur yang diperdapat di Profil Jabatan Kehakiman Syar iah Negeri Sabah (Sabah:2010)

Yang ketiga adalah Mahkamah Rayuan Syariah dengan pelaksanaannya adalah:

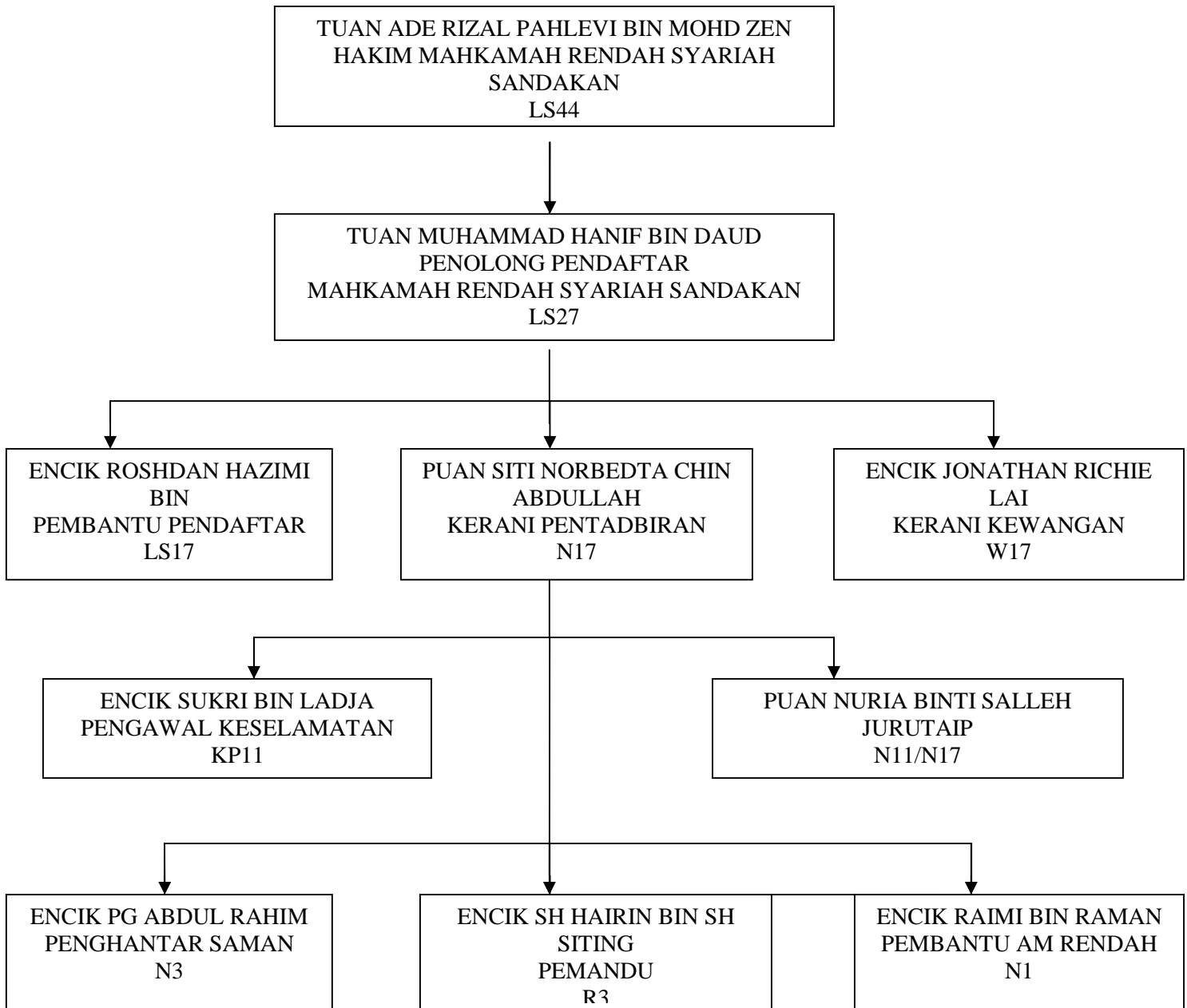
1. Mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidangkuasa asalnya.
2. Mengawasi perjalanan pengendalian kes Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh memanggil rekod mana-mana kes mahkamah itu dalam menjalankan bidangkuasa semakannya<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Brosur yang diperdapat di Profil Jabatan Kehakiman Syar iah Negeri Sabah (Sabah:2010)

<sup>32</sup> Brosur yang diperdapat di Profil Jabatan Kehakiman Syar iah Negeri Sabah (Sabah:2010)

## Carta Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Sandakan



Sumber Data : Fail Meja Penolong Pendaftar

Adapun keterangan dari carta organisasi tersebut diuraikan bahwa Tuan Ade Rizal Pahlevi bin Mohd Zen adalah merupakan Hakim Syarie di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan. Adapun tugas Hakim Syarie Pegawai Syariah adalah mendengar, membicarakan memutuskan Kasus Mal mahakamh Rendah Syariah, dalam pada itu juga beliau mengendalikan sebutan dan perbicaraan kasus-kasus jenayah syariah dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah, membuat pengiraan dan pembahagian harta pusaka orang-orang Islam, menyediakan alasan penghakiman, menandatangani saman/notis/ permohonan perintah/waran/bon/sapina dan lain-lain dokumen, mendengar ikrar, wakalah dan menandatangani affidavit, mengawasi dan bertanggungjawab ke atas karyawan dalam menjalankan tugas selaku ketua pejabat, mengawal selia urusan kewangan pejabat, dan lain-lain berkaitan, dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa<sup>33</sup>.

Bagi Penolong Pendaftar pula, tugas yang dijalankan adalah bertanggungjawab dalam penerimaan dan penyemakan segala tuntutan dan permohonan kasus Mal, di Mahkamah Rendah Syariah daerah dan menentukan tarikh sebutan, bertanggungjawab dalam urusan pendaftaran semua kasus Jenayah di Mahkamah Rendah Syariah Daerah dan menentukan tarikh sebutan kasus, bertanggungjawab dalam penerimaan pendaftaran semua kasus faraid di Mahkamah, bertanggungjawab dalam urusan penyediaan rekod rayuan kasus-kasus Mahkamah

---

<sup>33</sup> Fail Meja Hakim Mahkamah Rendah Sandakan.



Tinggi Syariah, bertanggungjawab dalam semua urusan rekod-rekod Mahkamah, menyediakan laporan bulanan dan tahunan, menyemak segala keputusan (draf perintah) yang telah diputuskan oleh Hakim, menguruskan pengendorsan saman, waran dan perintah, dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan<sup>34</sup>.

Adapun tugas Pembantu Pendaftar bagian pentadbiran kehakiman adalah. Menerima permohonan pendaftaran kasus Mal Mahkamah Tinggi/Rendah Syariah, menerima permohonan pendaftaran Kasus Jenayah Mahkamah Tinggi/Rendah, menerima permohonan pendaftaran Kasus Faraid. Menguruskan persiapan sebutan/perbicaraan dalam Dewan Mahkamah dan Kamar Hakim, membantu Hakim dalam melaksanakan prosiding kehakiman ketika sebutan / perbicaraan di dalam Dewan Mahkamah dan kamar hakim, menguruskan surat menyurat berkaitan kasus seperti notis tangguhan, sapina saksi, waran tangkap, bon jamin, Waran Penjara, surat kepada Peguam Syarie, Pendakwa Syarie, pihak-pihak dan lain-lain, menguruskan dan melaksanakan Draf dan Perintah yang telah diputuskan oleh Hakim mengemaskini data dalam Mahkamah Syariah, lain-lain tugas dari masa ke semasa<sup>35</sup>.

Sementara itu, tugas Pembantu Am Rendah dibagian pentadbir/ kewangan adalah:

1. Bertanggungjawab mengagihkan Koran kepada semua pegawai-pegawai berkenaan.
2. Bertanggungjawab stempel surat dan merekod surat-surat rasmi keluar/masuk.

---

<sup>34</sup> Fail Meja Penolong Pendaftar

<sup>35</sup> Fail Meja Pembantu Pendaftar

3. Bertanggungjawab mengagihkan surat atau dokumen untuk di serah kepada pegawai yang berkaitan.
4. Bertanggungjawab memastikan mesin fotostat dalam keadaan baik untuk digunakan.
5. Bertanggungjawab memastikan bilik menyimpan fail-fail berkaitan kes dan fail pentadbiran direkod keluar/masuk dalam keadaan baik dan sempurna.
6. Bertanggungjawab membantu urusetia dalam penyediaan keperluan mesyuarat/ seminar/ bengkel yang dianjurkan di luar jabatan.
7. Bertanggungjawab memastikan surat-surat yang hendak di pos di hantar dengan segera, dan surat yang dihantar dengan serahan tangan ke pejabat yang berdekatan.
8. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa<sup>36</sup>.

Tugas bagi penghantar notis pula adalah menguruskan surat-menyurat berkaitan kasus seperti notis tangguhan, sapina saksi, waran tangkap, bon jamin, waran penjara, surat kepada Peguam Syarie, Pendakwa Syarie, pihak-pihak dan lain-lain, menguruskan dan melaksanakan draf dan perintah yang telah diputuskan oleh Hakim, mengemaskini data dalam Mahkamah Syariah, lain-lain tugas dari semasa ke semasa<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Fail meja Pembantu Am Rendah

<sup>37</sup> Fail meja Pembantu Pendaftar

Adapun tugas bagi pengawal keselamatan pula, tugasnya adalah menjaga keselamatan, kemudahan dan alatan pejabat, menjaga ketenteraman pejabat ketika dewan sedang bersidang, menerima arahan ketua dari masa ke semasa.

Tugas bagi pemandu adalah membawa pegawai ke destinasi yang dituju, mengikut arahan pegawai dari masa ke semasa.

Demikianlah keterangan tugas-tugas para karyawan yang bekerja di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan.

### **BAB III**

#### **NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM**

##### **A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum**

*Nafaqat* adalah kata jama` daripada *nafqah* yang diambil dari *al-infaq*, ertinya : “*Mengeluarkan atau menghabiskan*”. Kalimah *infqah* ini digunakan kepada perbuatan yang mendatangkan kebajikan sahaja. Manakala nafqah dari segi istilah ialah “*Setiap barang yang diperlukan oleh manusia sama ada makanan, minuman, pakaian atau tempat kediaman*”<sup>38</sup>.

Dinamakan nafkah ialah karena ia dikeluarkan atau dihabiskan dengan tujuan mendapatkan kebutuhan diatas<sup>39</sup>.

Pengertian nafkah secara Terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha’ diantaranya:

1. Abdul Rahman Al-Jaziri mendefinisikan nafkah yaitu: Seseorang mengeluarkan kebutuhan hidup kepada orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti air, minyak, listrik dan sebagainya<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Mohd Saleh Bin Ahmad, *Perkahwinan dan Perceraian dalam Islam*, (Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid) Cet.1,2009 h.61

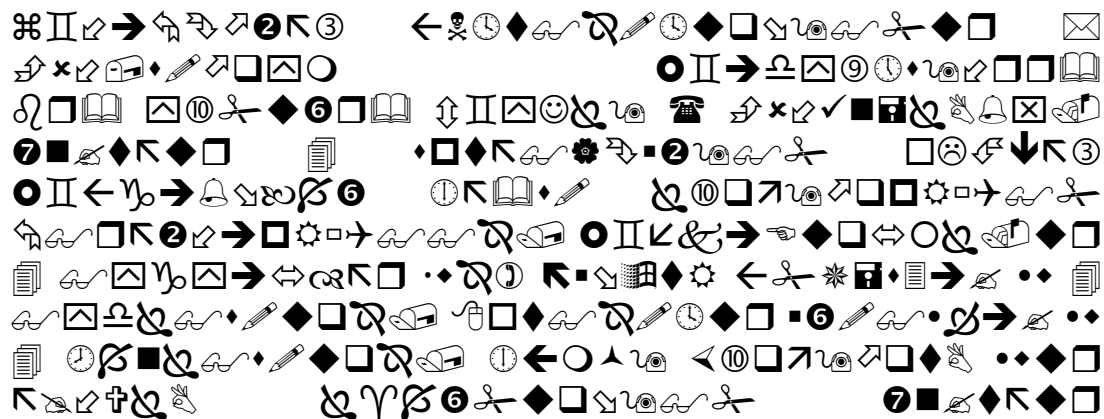
<sup>39</sup> Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Terjemah oleh : Ridzuan bin Hashim),(Kuala Lumpur : Pustaka Salam), Jilid 4, h.863

<sup>40</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘Ala Mazahibul Arba’ah*, (Mesir : Maktabul Tijariyatul Kubra, 1979), Jilid 4, h.533

2. Al-Said Al Imam Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani mengemukakan definisi nafkah : Sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan,minuman dan selain keduanya<sup>41</sup>.
3. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah yaitu : Sesuatu yang diperlukan oleh isteri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga serta biaya untuk pengobatan<sup>42</sup>.
4. Hasan Ayyub mendefinisikan: Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain<sup>43</sup>.

Mengenai dasar hukum kewajiban seorang ayah mengeluarkan nafkah terhadap anak berdasarkan dalil Al-Quran, Hadis dan Ijma Ulama. Dasar hukum dari Al-Quran antara lain:

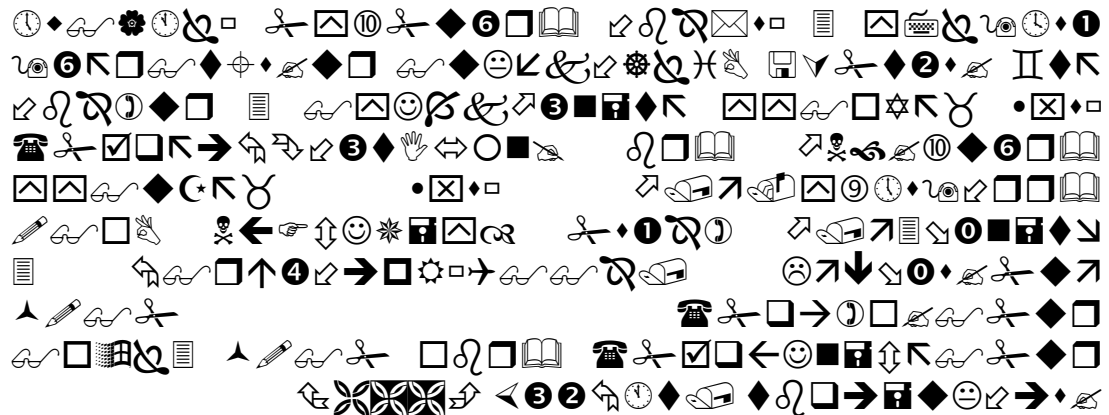
1. Surah Al-Baqarah (2) :233, yaitu :



<sup>41</sup> As-Said Al Imam Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan), Jilid 3,h.218

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,(Jakarta: Dar al-Fikri, 1983), Jilid 7,h.77

<sup>43</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikh Keluarga*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar),Cet ke-4,h.383



Penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara Yang sepatutnya. 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap Iaitu bagi orang Yang hendak menyempurnakan tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajiban Yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu Dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) Yang kamu mahu beri itu Dengan cara Yang patut. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua Yang kamu lakukan<sup>44</sup>.

Kata *Waalal mauludu lahu* menunjukkan wajib nafkah ayah terhadap anak terhadap kelemahannya. Kata *Rizkuhunna* berarti makanan para istri, dan kata (*Bilma`ruf*) berarti sekadar kemampuan suami. Penjelasan ayat diatas yaitu diwajibkan atas orang tua memberikan nafkah dan sandang istri dan anaknya dengan cara yang ma`ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku di suatu negeri tanpa berlebihan

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.47.

dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami. Karena ekonomi suami ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin<sup>45</sup>.

## 2. Surah Al-Talak (65) :6, yaitu:

Sementara, dasar hukum memberikan nafkah anak dari hadis Nabi antara lain adalah:

Sabda Rasulullah s.a.w:

: دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه  
: يا رسول الله , ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ,  
ما اخذت من ما له بغير علمه , فهل على في ذلك من جناح؟ فقال ( خذي من ماله بالمعروف ما  
يكفيك ويكفي بنيك ) متفق عليه

*Dari `Aisyah, katanya: Hindun puteri `Uthbah yang menjadi isteri Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah SAW kemudian ia berkata. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup bagi diriku dan anak-anakku, sehingga aku harus mengambil hartanya tanpa pengetahuannya. Adakah aku boleh melakukan hal tersebut?" Nabi bersabda. "ambillah dengan cara baik dari hartanya itu sekadar mencukupi diri dan mencukupi anakmu. (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>46</sup>*

Para ulama telah bersepakat berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis di atas dengan menyatakan bahawa nafkah anak wajib ditunaikan oleh bapa. Dari dalil di atas juga, keempat-empat mazhab iaitu Mazhab Maliki, Syafi`I, Hanafi dan Hambali

<sup>45</sup> Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, *Tafsir Al-Quranul Adzim*, "Terj. Bahrin Abu Bakar dkk", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001 ), Jilid 1-2, Cet. 1, h.565

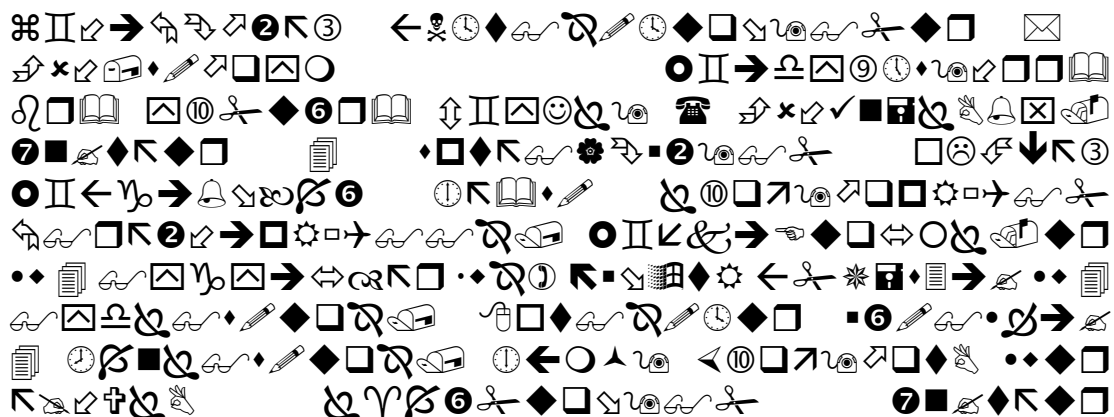
<sup>46</sup> M.Nashiruddin Al-Abani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), cet-1, h.426.

telah bersependapat bahawa bapa adalah orang yang paling utama berkewajiban menanggung nafkah anak. Tetapi yang timbul perselisihan sekiranya bapanya tidak ada atau tidak berkeupayaan. Bagaimanapun ini tidak menjejaskan hak anak-anak. Bagi Mazhab Maliki kewajiban menanggung nafkah terus menjadi tanggungjawab Baitulmal atau pemerintah sekiranya bapa tidak ada atau sebagainya.

## B. Kewajiban Memberi Nafkah

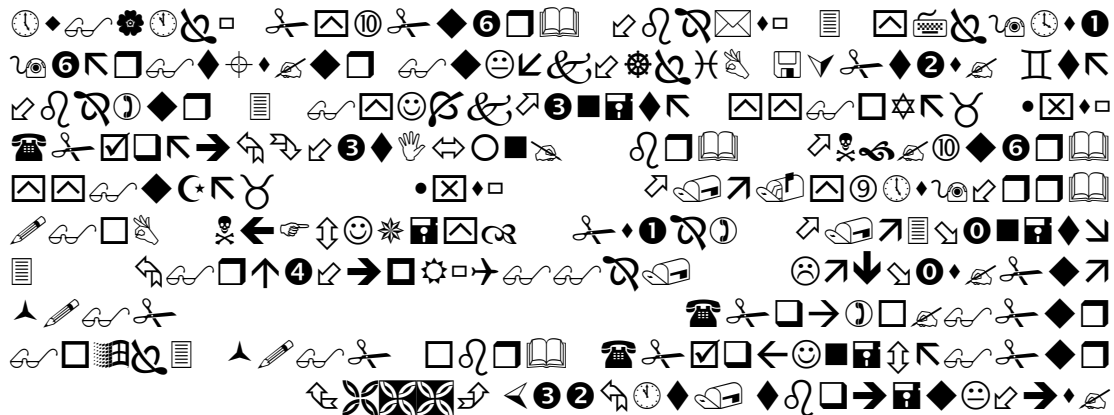
Ulama Fuqaha sepakat, kanak-kanak yang tidak mempunyai harta berhak menerima nafkah yang wajib dikeluarkan oleh ayahnya. Dalam hal ini, ayahnya tidak semestinya kaya tetapi cukup dia mampu berusaha bagi memperoleh nafkah. Ini kerana, anak adalah sebahagian daripada tanggungjawab ayahnya. Dengan demikian, bapa wajib memelihara dan membesarkan anaknya. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab itu, maknanya dia menghidupkan dirinya sendiri dan menghidupkan diri itu hukumnya adalah wajib<sup>47</sup>

Seperti dalam firman Allah s.wt dalam surah Al-Baqarah ayat 233:



<sup>47</sup> Huzaemah, *Didik Anak Gaya Rasulullah*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn Bhd) Cet 1, 2010 h.164





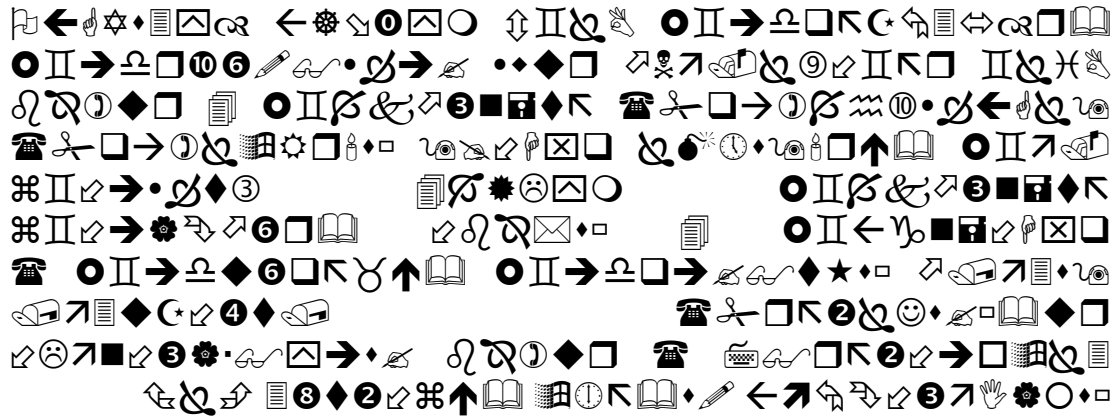
*Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap Iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajiban yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu Dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu Dengan cara yang patut. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan<sup>48</sup>.*

Ayat itu menunjukkan ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anak kerana mereka masih berada dalam keadaan yang lemah. Allah meletakkan kewajiban memberi nafkah kepada bapa kerana dia adalah orang yang terdekat dengan anaknya dan yang menyayangi anaknya. Allah juga menyebutkan ibu turut wajib menerima nafkah daripada suaminya iaitu bapa kepada anak-anaknya. Ini kerana, makanan biasanya sampai kepada anak melalui ibu yang menyusuinya.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.47.

Dalam firman Allah swt dalam surah At-thalaq ayat 6 :



Tempatkanlah isteri-isteri (yang menjalani idahnya) itu di tempat kediaman kamu sesuai Dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu Yang menyakiti mereka (di tempat tinggal itu) Dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu). dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan berundinglah di antara kamu (dalam hal menyusunnya) Dengan cara Yang baik. dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya<sup>49</sup>.

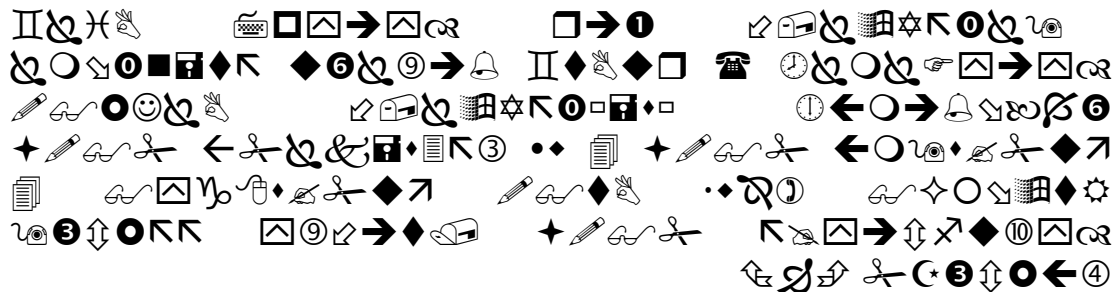
Makanan tidak mungkin sampai kepada bayi yang berada dalam kandungan kecuali melalui ibunya. Kaedah *fiqhiyyah* menyebutkan, “Apa sahaja perkara yang perlu kita lakukan dalam usaha menyempurnakan sesuatu kewajiban, maka perkara itu juga adalah wajib”.

Dalam memberikan nafkah kepada keluarga, bapa perlu melakukannya dengan *bi al-ma`ruf* yaitu dengan cara yang baik ataupun makruf, sesuai dengan

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.817.

keadaan ataupun kemampuannya. Dia mungkin orang kaya ataupun orang miskin.

Allah menjelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 7:



*Hendaklah orang Yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa Yang di sempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa Yang diberikan Allah kepadanya (sekadar Yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) Yang diberikan Allah kepadaNya. (orang-orang Yang Dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan<sup>50</sup>*

Berdasarkan perintah Allah itu, Imam Maliki membuat kesimpulan, bapa boleh mengupah perempuan yang bukan ibu kepada anaknya dengan tujuan menyusukan anaknya, memberikan makanan dan pakaian kepadanya. Abu Hanifah juga memiliki pendapat yang sama tetapi anak-anak muridnya mempunyai pendapat yang berbeza. Mereka mengatakan perbuatan mengupah seperti itu tidak termasuk *majhulah* iaitu tidak diketahui dan dengan itu kita tidak boleh melakukannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, menyewa perempuan seperti itu adalah istihsan ( ) tetapi menurut Imam Maliki dan Imam Syafie, ia adalah peraturan pokok dalam usaha menyusukan anak ( *al-irtidha* ) ( ) dan tugas-tugas yang lain.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.817.

Ketetapan itu adalah berlandaskan `urf ( ) ataupun kebiasaan dan hukum adat serta tradisi<sup>51</sup>.

### 1. Urutan yang Wajib Menanggung Nafkah

Sekiranya semua ahli keluarga terdekat (ushul) ( ) adalah ahli waris, mereka wajib memberikan nafkah sesuai dengan bahagian masing-masing seperti yang terdapat dalam harta warisan. Dalam hal ini, taraf kerabat ataupun hubungan mereka, sama ada jauh ataupun dekat tidak membezakan tanggungjawab itu.

Apabila kanak-kanak yang fakir mempunyai ibu dan datuk, iaitu bapa pada bapa dan kedua-duanya adalah orang kaya, mereka wajib mengeluarkan nafkah sebanyak tiga pertiga. Maksudnya, ibu memenuhi satu pertiga dan datuk bersama bapa membayar dua pertiga.

Sekiranya kanak-kanak fakir mempunyai nenek iaitu ibu pada ibu dan/ataupun bu pada bapa dan datuk iaitu bapa pada bapa, ketiga-tiga mereka wajib mengeluarkan nafkah kepada kanak-kanak itu, sesuai dengan ukuran bahagian mereka daripada harta peninggalan anak itu<sup>52</sup>.

Kedua-dua nenek wajib memberikan nafkah kepada anak sebanyak satu perenam sementara datuk perlu membayar sebanyak lima perenam. Sekiranya datuk

---

<sup>51</sup> *Ibid* h.165

<sup>52</sup> Huzaemah, *Didik anak gaya Rasulullah*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn Bhd) Cet 1, 2010 h.165

kepada kanak-kanak itu tidak menggantikan sepenuhnya tempat bapa anak itu, orang lain boleh menyertainya dalam memberikan nafkah kepada anak itu iaitu cucunya. Hal yang demikian berlaku sekiranya sebahagian `ashabah ( ) terhibab kerana terhalang daripada mendapatkan warisan.

Apabila datuk berperanan menggantikan bapa sepenuhnya, orang lain tidak perlu mengeluarkan nafkah kepada kanak-kanak berkenaan. Ini kerana, seorang bapa juga tidak memerlukan nafkah daripada orang lain apabila dia yang bertanggungjawab penuh ke atas anaknya. Ulama Syafiyyah menjelaskan, sekiranya kanak-kanak fakir mempunyai bapa saudara dan datuk iaitu bapa kepada bapa, bapanya sahaja yang perlu mengeluarkan nafkah tanpa membebankan orang lain. Ini kerana, datuk menghibab bapa saudara anak itu daripada warisan.

Dalam hal ini, datuk menggantikan peranan bapa sepenuhnya. Jadi, hokum yang dikenakan kepada datuk sama seperti hukum yang dikenakan kepada bapa iaitu dia wajib memberikan nafkah kepada anak tanpa disertai orang lain.

Sekiranya ahli keluarga *ushul* ( ) bukan ahli waris, kewajipan memberi nafkah itu jatuh kepada orang yang dekat darjatnya dengan orang yang wajib memberikan nafkah kepada anak. Apabila darjat mereka semua sama, kewajipan memberi nafkah terbeban kepada mereka semua secara sama rata. Sekiranya kanak-kanak yang fakir itu mempunyai datuk iaitu bapa pada ibunya, datuknya itu yang wajib mengeluarkan nafkah. Begitulah pegangan mazhab Hanafi.

Apabila sebahagian ahli keluarga *ushul* itu adalah waris yang berhak mendapatkan warisan sementara ada sebahagian lagi yang tidak berhak, bagi mereka

yang sama darjatnya dalam kekerabatannya, ahli yang bukan waris tidak mempunyai kewajiban sedikit pun mengeluarkan nafkah. Mereka yang berhak mendapatkan warisanlah yang wajib memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan bahagian mereka dalam warisan itu.

Seandainya seorang anak yang fakir itu mempunyai dua orang datuk dan dua orang nenek daripada kedua-dua ibu dan bapanya, nenek daripada sebelah ibunya yaitu ibu pada ibu tidak mempunyai kewajiban sedikit pun bagi mengeluarkan nafkah. Nafkah itu wajib ditanggung oleh tiga orang yang lain yang disebutkan tadi, sesuai dengan bahagian mereka dalam warisan. Nenek perlu mengeluarkan satu per enam dan lima per enam dibebankan kepada datuk daripada sebelah bapa, iaitu bapa pada bapa.

Sekiranya sebahagian ahli keluarga *ushul* ( ) lebih dekat darjatnya pada anak daripada yang lain, mereka itulah yang wajib memberikan nafkah, sama ada mereka itu waris ataupun tidak. Tidak ada sedikit pun kewajiban bagi keluarga yang jauh darjatnya bagi mengeluarkan nafkah walaupun mereka adalah waris.

Apabila seorang kanak-kanak yang fakir mempunyai buyut, iaitu datuk pada bapa dan nenek pada ibu, orang yang wajib membayar nafkah kepadanya adalah datuk pada ibu walaupun dia bukan waris. Buyut daripada sebelah bapa tidak wajib sedikit pun membayar nafkah walaupun dia adalah waris. Ini kerana, walaupun dia bukan waris, datuk pada ibu memiliki darjat yang lebih dekat pada anak itu berbanding orang lain. Ketetapan ini berlandaskan hubungan yang erat di antara memberi dan yang menerima tanpa mengambil kira faktor warisan. Apabila ada unsur

kekerabatan iaitu *juz`iyyah* (جزئية) yang semakin dekat darjatnya dengan anak, semakin kuatlah kewajiban orang itu bagi mengeluarkan nafkah.

Dalam hal memberikan nafkah ini, tentu orang yang memberikan nafkah disyaratkan mempunyai harta yang cukup bagi dirinya dan keluarganya sendiri serta memiliki sedikit harta yang berlebihan yang boleh dia berikan kepada orang lain. Maksud keluarga dalam konteks ini adalah isterinya iaitu ibu kepada anak-anaknya, anak-anaknya dan pembantu rumahnya, sekiranya ada. Sekiranya dia tidak memiliki kelebihan harta, tidak wajib baginya memberikan nafkah itu.

Hadis daripada Muslim menyatakan, “Mulakanlah dengan dirimu sendiri, bersedekahlah kepada dirimu dan sekiranya berlebihan, sedekahkan kepada keluargamu. Sekiranya masih ada yang lebih selepas itu, berikan pula kepada kerabatmu”.

Kita tidak boleh mengukur kekayaan individu hanya dengan melihat nafkahnya yang berlebihan dalam sehari semalam. Orang itu mungkin memiliki RM1,000 pada awal bulan tetapi pada akhir bulan atau awal bulan yang berikutnya, dia mungkin hanya mempunyai RM10. Dengan demikian, dia tidak wajib mengeluarkan nafkah kerana dia sudah menjadi fakir. Sekiranya dia tetap diwajibkan memberi nafkah, tentu itu bukan tindakan yang adil dan bijaksana.

Kesimpulannya, kita perlu mempertimbangkan harta yang berlebihan yang ada pada individu sebelum menetapkan sama ada dia perlu mengeluarkan nafkah ataupun tidak. Jangan sampai dia menjadi fakir. Ini kerana, ramai orang yang mempunyai

harta yang berlebihan hanya pada waktu-waktu tertentu dan bukannya sepanjang masa<sup>53</sup>.

## **2. Ukuran Nafkah**

Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal semuanya sepakat, suami perlu mengeluarkan nafkah sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Keperluan itu termasuklah makan minum, tempat tinggal, gaji pembantu rumah, upah menyusu dan mengasuh. Dia juga perlu menggantikan pakaian anak-anak sekali setiap empat bulan.

Jumhur ulama Malikiah, Syafiyyah dan Hanabilah menyatakan kita tidak boleh mengukur pemberian nafkah dengan mata wang kecuali ada persetujuan antara kedua-dua belah pihak yang terlibat. Dalam hal ini, orang yang mengeluarkan perlu memberikan sesuatu yang jelas dan dalam bentuk yang diperlukan seperti makanan dan pakaian. Alasan mereka adalah mata wang itu tidak wajib diberikan.

Dalam kalangan ulama Hanafiah, wujud dua pendapat dalam hal itu. Pertama, mereka menyatakan kita boleh mengukur nafkah dengan menggunakan mata wang. Kedua, kadi ataupun hakim berhak menentukan jenis barang-barang dan nilainya yang hendak dinafkahkan.

## **C. Nafkah dalam undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah.**

### **I. Kewajiban menanggung Nafkah Anak**

---

<sup>53</sup> *Ibid*



Di dalam Enakmen keluarga Islam Negeri Sabah tahun 2004 menyatakan dalam pasal 73 ayat (1) tentang kewajiban menanggung nafkah anak : kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajiban seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

Dalam pasal 73 ayat (2) pula menyatakan kecuali seperti tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban seseorang yang bertanggung di bawah hukum syarak, supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan kepada nafkah kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah mati atau tempat di mana bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana bapanya tidak berupaya menanggung nafkah mereka<sup>54</sup>.

## **II. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak**

Dalam pasal 74 ayat (1) menyatakan : Mahkamah boleh pada bila-bila masa memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah untuk faedah mana-mana anaknya:

- a. Jika dia telah enggan atau cuai mengadakan peruntukan dengan munasabah bagi anaknya itu;

---

<sup>54</sup> Enakmen undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah, Tahun 2004, h.42

- b. Jika dia telah meninggalkan langsung isterinya dan anaknya itu adalah dalam jagaan isterinya;
- c. Dalam masa menanti keputusan sesuatu prosiding hal ehwal suami isteri;
- d. Apabila membuat atau selepas daripada membuat suatu perintah meletakkan anak itu dalam jagaan seseorang lain; atau
- e. Apabila memberi kebenaran kepada lelaki itu untuk berpoligami di bawah seksyen 23.

Ayat (2) menyatakan Mahkamah adalah juga berkuasa memerintahkan seseorang yang bertanggung di bawah hokum syarak supaya membayar atau memberi sumbangan terhadap nafkah seseorang anak jika Mahkamah berpuas hati bahwa memandang kepada kemampuannya adalah munasabah bagi Mahkamah memerintahkan sedemikian<sup>55</sup>.

Ayat (3) pula menyatakan sesuatu perintah di bawah subseksyen ( 1) atau (2) boleh mengarahkan supaya pembayaran dibuat kepada orang yang menjaga atau memelihara dan mengawal anak itu atau kepada pemegang-pemegang amanah bagi anak itu<sup>56</sup>

Perkataan “lelaki” yang dicatat dalam seksyen ini membuktikan bahawa bukanlah wanita yang berkewajipan menanggung nafkah anak-anak. Perkataan ‘lelaki’ itu menunjukkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

anak setelah perceraian. Ayah juga wajib memberikan nafkah tersebut sehingga anak itu mandiri.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PADA MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI SANDAKAN SABAH**

#### **A. Pelaksanaan Putusan**

Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif yang bersifat 'independent' berfungsi mengadili berbagai perkara yang ada di tengah masyarakat. Mahkamah Syariah adalah lembaga yudikatif mengadili perkara hukum di lingkungan privat (peribadi) khususnya kasus-kasus yang lahir dalam rumah tangga misalnya di bidang perceraian, thalaq, rujuk, nafkah, waris dan sebagainya. Secara hukum, keluarga yang berperkara dapat mencari jalan penyelesaian akhirnya di Mahkamah Syariah tersebut, misalnya Pelaksanaan nafkah terhadap anak setelah perceraian.

Pertalian darah antara anak dan ayah tidak terputus meskipun sesuatu perkahwinan itu telah berakhir. Ayah tetap perlu menjalankan tanggungjawabnya untuk memberi nafkah kepada anak-anak sehingga tamat pengajian peringkat tertinggi dan mampu berdikari. Sesungguhnya kewajipan bapa untuk memberi nafkah kepada anak-anak merupakan perkara yang jelas dan dinyatakan dalam perundangan Islam di Malaysia dan juga hukum syarak.

Bab ini penulis memfokuskan kepada pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah Sandakan Sabah pada nafkah anak setelah perceraian sesuai dengan putusan Mahkamah tersebut. Karena membayar nafkah anak merupakan kewajiban utama yang harus dilakukan dilaksanakan seorang ayah terhadap anaknya baik itu pangan, sandang dan tempat tinggal yang layak.

Sebelum membuat sebarang tuntutan nafkah anak, maka seseorang hendaklah terlebih dahulu membuat serta mengemukakan penyata tuntutan nafkah anak yang hendak dituntut dan dikepilkan bersama-sama dengan dokumen yang berkenaan sebelum membuat permohonan pendaftaran kes di Mahkamah Syariah. Selepas menerima sesuatu permohonan mengenai kes tuntutan nafkah anak. Selepas itu, Mahkamah akan mengeluarkan satu saman kepada pihak defendan bersama satu salinan permohonan yang telah dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak defendan hadir di hadapan Mahkamah untuk membolehkan Mahkamah menjalankan perbicaraan mengenai tuntutan tersebut<sup>56</sup>.

Sekiranya pihak defendan menghadirkan diri seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah, maka prosiding tuntutan nafkah boleh dimulakan dan berjalan seperti biasa tetapi jika sekiranya pihak defendan tidak menghadiri diri ke Mahkamah seperti mana yang diarahkan, maka Mahkamah boleh mengeluarkan suatu amaran supaya hadir di Mahkamah dan seterusnya satu waran tangkap akan dikeluarkan jika amaran tersebut tidak diendahkan. Sebarang tuntutan nafkah anak hanya akan dibicarakan selepas pihak defendan membayar denda yang dikenakan pada waran tangkap sebagai ikat jamin. Seterusnya, barulah tuntutan nafkah anak dibicarakan di Mahkamah Syariah. Sekiranya pihak plaintif dan defendan bersetuju di atas sesuatu kadar yang ditetapkan oleh Mahkamah setelah melihat dan mengukur kepada kemampuan pihak defendan, maka pihak Mahkamah akan mengeluarkan suatu arahan menuntut pihak

---

<sup>56</sup> Hassan( Penolong pegawai pendaftar ), wawancara, Tgl 29 Mac 2011

defendan agar menunaikan nafkah anak tersebut. Sekiranya pihak defenden masih ingkar menunaikan nafkah anak itu selepas Mahkamah mengeluarkan arahan maka, pihak plaintif boleh membuat tuntutan menguatkuasakan permohonan nafkah anak tersebut<sup>57</sup>.

Seperti yang terjadi dalam kasus Sarmilah binti Damit ( Plaintif ) No.Kpt 851118-12-5876. Dalam penyata tuntutan Plaintif telah mendakwa bahwa Defenden yaitu Herman bin Razali ( Defenden ) No.Kpt : RF 136476 tidak pernah memberi nafkah kepada anak sejak terjadinya perceraian antara keduanya. Mereka berdua telah disabitkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan pada 26 ogos dengan talak satu. Sepanjang perkahwinan mereka berdua telah dikurniakan seorang anak perempuan yang berumur 3 tahun 1 bulan. Selain itu juga Plaintif mendakwa defenden tidak pernah memenuhi keperluan anak seperti pakaian, makan dan perubatan anak mereka. Oleh yang demikian Plaintif menuntut nafkah yang diberikan kepada anak tersebut sebanyak RM 300 sebulan<sup>58</sup>.

Sepanjang perbicaraan dijalankan pihak defenden tidak menghadirkan diri pada setiap sesi perbicaraan dijalankan. Oleh itu, keputusan hakim telah dibuat tanpa kehadiran defenden. Setelah Mahkamah memanggil dan juga mengambil keterangan saksi-saksi dan mahkamah berpuas hati atas keterangan tersebut, mahkamah telah

---

<sup>57</sup> Tuan Ade Rizal Pahlevi ( Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sandakan ), *wawancara*, Tgl 29 Mac 2011

<sup>58</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL NO 12002-024-0063 THN 2010, 14 Jun 2010.

membuat keputusan seperti berikut : Dibuktikan bahawa defenden telah gagal membayar nafkah semasa anak. Dan dibuktikan juga bahawa selepas perceraian anak telah dijaga oleh plaintif. Dalam tempoh itu dibuktikan bahawa defenden telah cuai memperuntukkan nafkah terhadap anak yang telah dijaga oleh plaintif. Oleh yang demikian defenden membayar nafkah anak dengan kadar RM300 sebulan bermula pada bulan februari 2010. Nafkah yang tertunggak boleh dibayar secara ansuran dengan kadar RM100 sebulan.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden Sarmilah ( istri ) mengatakan mantan suami tidak membayar nafkah anak walaupun putusan hakim telah dikeluarkan, dia juga mengatakan mantan suaminya tidak mempedulikan nafkah sejak mereka bercerai. Alasan mantan suami tidak bayar nafkah anak, dia mengatakan gajinya kecil dan tidak mampu bayar nafkah seperti yang dituntut istri tetapi ayah hanya membayar separuh yang dituntut oleh istri<sup>59</sup>

Contoh kasus lain adalah seperti berikut Arsinah Binti Daning ( Plaintiff ) NO KPT 801009-12-5716 dengan Nurdin Bin Aripin NO KPT : 801011-12-5897. Defenden dan plaintif telah berkahwin pada 2006 bertempat di Sandakan. Mereka telah berkahwin secara sah dengan menggunakan wali nasab kepada plaintif. Mereka berdua telah disabitkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan pada 14 Oktober 2009 dengan talak satu. Sepanjang perkahwinan mereka telah dikurniakan seorang anak lelaki. Dalam penyata tuntutan plaintif telah mendakwa bahwa bekas

---

<sup>59</sup> Sarmilah (istri,) wawancara, Tgl 30 April 2011.

suaminya tidak pernah memberikan nafkah anak bermula dari bulan oktober 2009 sehingga kes ini didaftarkan. Selain itu juga, plaintif juga mendakwa segala perbelanjaan anak ditanggung seorang oleh plaintif. Oleh yang demikian plaintif menuntut nafkah diberikan kepada anak tersebut sebanyak RM 450 sebulan.

Dalam putusan Hakim, atas persetujuan bersama direkodkan bahwa defenden perlu membayar kepada plaintif sebanyak RM 450 sebulan secara tunai. Perintah berkuatkuasa serta merta dan bermula hari pertama pada bulan hadapan sehingga anak berumur 18 tahun. Namun begitu pada 15 desember 2010 plaintif telah memfailkan semula permohonan untuk penguatkuasaan perintah. Dalam penyata tuntutan, plaintif telah mendakwa walaupun telah diperintah oleh pihak mahkamah untuk membayar nafkah semasa anak kepada plaintif namun defenden tidak pernah membayar nafkah tersebut dari mula perintah nafkah berkuatkuasa hingga kes yang baru ini difailkan. Selain itu juga plaintif memohon kepada mahkamah supaya defenden membayar tunggakan nafkah anak secara memasukkan ke dalam akaun bank sebanyak RM 3,600. Pihak defenden telah bersetuju untuk melunaskan hutang nafkah semasa anak kepada plaintif secara tunai<sup>60</sup>.

Hasil wawancara penulis dengan responden dengan Arsinah (istri) ketika penulis bertanya kenapa mantan suami tidak membayar nafkah anak. Dia mengatakan mantan suaminya ada keluarga baru dan selepas berkawin lain suami langsung tidak

---

<sup>60</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL NO 12002-024-0120 THN 2010, 16 Mac 2010



mempedulikan anak mereka. Sebelum mantan suami bernikah lain, sememangnya suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak mereka<sup>61</sup>.

Kasus lain adalah Zainab Bin Sidun NO KPT 690515-12-5680 ( Plaintiff ) dengan Mohamad Yusof Bin Ali NO KPT 640820-12-5411 ( Defenden ). Plaintiff telah mendakwa bahwa defenden tidak pernah bayar nafkah semasa anak dari mula tarikh mereka disabitkan bercerai. Plaintiff juga telah menuntut nafkah anak sebanyak RM 300 sebulan. Pada perbicaraan di mahkamah defenden membuat rayuan bahwa gaji defenden tidak mencukupi untuk membayar nafkah RM 300 sebulan kerna gaji defenden sebanyak RM 300 sebulan. Defenden hanya boleh membayar nafkah semasa anak sebanyak RM 200 sahaja. Setelah Mahkamah mengkaji kes tersebut, atas putusan hakim dan persetujuan bersama. Mahkamah memerintahkan defenden bayar nafkah semasa anak sebanyak RM 200 sebulan secara tunai<sup>62</sup>.

Dalam wawancara penulis dengan responden Mohamad Yusof (mantan suami) dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menampung nafkah anak kerana gajinya tidak mencukupi, ini disebabkan dia bekerja sebagai penjual kereta di salah satu syarikat kereta, dia juga mengatakan ekonomi tidak kukuh untuk membayar sepenuhnya apa yang dituntut oleh istri sebanyak RM 300 sebulan tetapi hanya

---

<sup>61</sup> Arsinah (istri), wawancara, Tgl 30 April 2011.

<sup>62</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL 12002-024-0573 THN 2010, 6 April 2010

mampu membayar RM 200 sebulan sahaja, dengan persetujuan bersama putusan hakim dan pihak istri<sup>63</sup>.

Seperti kasus lain adalah Juriam Binti Sarael NO KPT IP 12091-2586 (Plaintif) dengan Abu Bin Buti NO KPT 520303-12-5409 (Defenden). Mereka berdua telah bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah pada 19 Mac 2008 dengan talak satu. Sepanjang perkahwinan mereka telah dikurniakan anak seramai 8 orang, 4 lelaki dan 4 perempuan. Dalam penyata tuntutan plaintif telah mendakwa bahwa bekas suaminya yaitu defenden tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya bermula dari perintah nafkah anak yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Sandakan pada 24 November 2009 sehinggalah kes ini di daftarkan semula. Oleh yang demikian plaintif memohon penguatkuasaan perintah Mahkamah bertarikh 24 November 2009. Selain itu plaintif juga memohon kepada mahkamah agar Defenden membayar nafkah anak secara tunai sebanyak RM 150 dalam tempoh satu bulan. Tuan Hakim telah menolak permohonan plaintif. Dan mahkamah telah memerintah supaya Defenden membayar kadar nafkah yang telah ditetapkan di dalam perintah terdahulu secara tetap sebulan sekali melalui pejabat agama JHEAINS (Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah), dan bukannya di bayar secara harian<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Mohamad Yusof (ayah), *wawancara*, Tgl 30 April 2011.

<sup>64</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL 12002-033-0309 THN 2010, 26 Julai 2010.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang anak dari responden (Zura) mengatakan bahwa ayah mereka tidak membayar nafkah kepada mereka delapan beradik, alasan ayah tersebut tidak membayar nafkah karena ayah telah menikah lain dan tidak mempedulikan kami sekeluarga, lantaran ada keluarga baru. Selepas bercerai dengan ibu mereka, ayah mereka tidak pernah memberikan nafkah. Ayah mereka seolah-olah lari dari tanggungjawab.<sup>65</sup>

Seterusnya kasus lain dalam hal ini adalah Sanjanah@Saharra Binti Awang Zainal NO KPT 701128-12-5438 ( Plaintiff ) dengan Mohd Aizan Bin Abu Hassan NO KPT 630903-02-5505. Mereka berdua telah berkahwin pada 29 Mac 1993 dan telah disabitkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan pada 24 Jun 2008 dengan talak satu. Sepanjang perkawinan mereka berdua telah dikurniakan anak seramai 5 orang, 2 lelaki dan 3 perempuan. Dalam penyata tuntutan Plaintiff telah mendakwa bahwa bekas suaminya yaitu defenden tidak pernah memberi nafkah kepada anak mereka walaupun plaintiff menuntut kepada defenden berulang kali secara lisan. Pada 22 Mac 2010 plaintiff melalui peguamnya telah mengeluarkan satu notis tuntutan kepada defenden menuntut tunggakan nafkah iddah dan nafkah anak sebanyak RM 20,300.00 setakat 28 Februari 2010. Namun begitu defenden masih lagi cuai dan gagal untuk mematuhi persetujuan yang telah direkodkan sebagai sebahagian daripada terma dalam perintah nafkah anak yang terdahulu. Oleh yang demikian plaintiff memohon defenden membayar tunggakan sebanyak RM 20,300.00

---

<sup>65</sup> Zura (anak), *wawancara*, Tgl 30 April 2011.

tersebut dalam masa 30 hari daripada tarikh perintah diberikan. Setelah mahkamah memanggil dan juga mengambil keterangan saksi-saksi dan mahkamah berpuas hati atas keterangan tersebut, mahkamah telah membuat keputusan.

Dibuktikan bahwa defenden telah gagal dan cuai dalam memberikan nafkah iddah dan anak setelah mereka berdua bercerai. Oleh yang demikian defenden membayar nafkah iddah dan anak yang tertunggak sebanyak RM 20.300.00 tersebut dalam masa 30 hari dari tarikh perintah diberikan. Dalam putusan Hakim, Tuan Hakim telah meluluskan permohonan sepertimana yang dipohon oleh plaintif<sup>66</sup>.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang daripada anak responden (Farid) dia mengatakan ayahnya ingkar dan lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah, dimana saya tertekan dengan sikap ayah yang pentingkan diri sendiri sehingga mengabaikan keperluan anak yang semakin meningkat. Ayah saya memang tidak pernah membayar nafkah setelah perceraian sehinggalah sekarang<sup>67</sup>.

Kasus lain adalah Zainab binti Indra NO KPT RF/125831 ( plaintif ) dengan Berkhan bin Salleh NO KPT RF/130827 ( defenden ). Mereka berdua telah berkahwin pada 14 November 2004 dan telah disabitkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan pada 30 Februari 2010 dengan talak satu. Sepanjang perkawinan mereka berdua telah dikurniakan anak seramai 2 orang. Dalam penyata

---

<sup>66</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL NO 12002-023-0232 THN 2010, 26 April 2010.

<sup>67</sup> Farid (anak), *wawancara*, Tgl 30 April 2011.

tuntutan plaintif telah mendakwa bahwa selepas perceraian berlaku pada 30 Februari 2010 defenden telah memberikan nafkah terhadap anak-anak tetapi pemberian tersebut tidak mencukupi untuk perbelanjaan anak-anak yang masih di bawah umur dan masih bersekolah. Plaintif juga mendakwa bahawa pemberian nafkah tersebut tidak menentu. Oleh yang demikian Plaintif Memohon agar defenden membayar nafkah anak anak seramai 2 orang sebanyak RM 500 setiap seorang setiap bulan melalui potongan gaji melalui majikan dan wang nafkah tersebut dimasukkan kedalam akaun plaintif di maybank. Dalam Putusan Hakim, Tuan Hakim telah meluluskan permohonan sepertimana yang di pohon oleh plaintif. Defenden hendaklah membayar nafkah semasa untuk 2 orang anak sebanyak RM 300 sebulan dan berkuatkuasa serta merta dari tarikh diputuskan<sup>68</sup>.

Dalam wawancara penulis dengan responden Zainab (istri) dia mengatakan mantan suami tidak pernah membayar nafkah, dia mengatakan bahwa suaminya membayar nafkah tidak menentu dan tidak mencukupi untuk perbelanjaan anak-anak yang masih bersekolah, alasan suami melakukan sedemikian karena suami beranggapan bahwa istrinya yang memanfaatkan dan mempergunakan nafkah tersebut untuk kepentingan sendiri tetapi perkara itu tidak berlaku bagi pihak istri. Pihak Mahkamah meluluskan permohonan istri untuk membayar nafkah anak melalui potongan gaji untuk dua orang anaknya dan dimasukkan ke akaun istri<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL NO 12002-024-0008 THN 2010, 23 September

<sup>69</sup> Zainab (istri), *wawancara*, Tgl 30 April 2011.

Seterusnya dalam kasus lain adalah Mahima Bin Mokhtar NO KPT 790617-12-5679 ( plaintiff ) dengan Omar bin Yusof NO KPT 750322-12-5423 ( defenden ). Mereka berdua telah berkahwin pada 3 Ogos 2008 dan telah disabitkan bercerai pada 20 November 2009 dengan talak satu. Sepanjang perkawinan mereka berdua telah dikurniakan 3 orang anak. Dalam penyata tuntutan plaintiff mendakwa defenden tidak pernah membayar nafkah semasa anak dari mula tarikh mereka berdua bercerai sehinggalah kes ini didaftarkan semula. Selain itu juga plaintiff juga mendakwa bahwa defenden tidak pernah memenuhi keperluan anak seperti pakaian, makan, perubatan dan perbelanjaan persekolahan anak-anak mereka. Oleh yang demikian plaintiff menuntut nafkah anak tersebut sebanyak RM 1000 sebulan. Dalam Putusan Hakim, Hakim telah menerima permohonan plaintiff. Defenden hendaklah membayar nafkah anak sebanyak RM 1000 sebulan secara tunai. Perintah berkuatkuasa serta merta dari tarikh diputuskan<sup>70</sup>.

Hasil wawancara penulis dengan responden Mahima (istri) dia mengatakan bahwa suaminya tidak membayar nafkah anak bermula dari berlakunya perceraian, istri mendakwa suaminya tidak pernah membayar nafkah dan memenuhi keperluan anak. Ini karena suami ingkar atas putusan hakim<sup>71</sup>

Menurut wawancara penulis dengan En.Hanif yaitu penolong pegawai pendaftar di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan, putusan Mahkamah Rendah

---

<sup>70</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah. KES MAL NO 12002-024-0672 THN 2010, 23 Mei 2010.

<sup>71</sup> Mahima (istri), *wawancara*, Tgl 30 April 2011.

Syariah telah memutuskan agar seorang ayah membayar biaya nafkah terhadap anak. Akan tetapi meskipun biaya nafkah anak telah diputus di Mahkamah Syariah, pada kenyataannya tidak semua orang tua laki-laki (ayah) mematuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak tersebut. Sehingga pihak isteri daftarkan semula kasus nafkah anak ini. Bila penguatkuasaan perintah dikeluarkan barulah ayah hendak bayar. Pada kebiasaannya hakim akan menjatuhkan hukuman penjara dan menyita harta ayah.

Begitulah pelaksanaan putusan di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan. Setelah keputusan dibuat ada juga ayah yang masih berdegil tidak membayar nafkah anak. Mereka juga ingkar dengan putusan hakim.

### **B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan.**

Terjadinya perceraian antara suami isteri menjadi penyebab seorang suami enggan membayar nafkah anak setelah bercerai. Malah kasus tentang tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan juga semakin bertambah dari hari ke sehari, malah ada juga suami yang enggan bekerjasama hadir ketika perbicaraan. Di sini penulis sertakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah perceraian.

#### **1. Faktor ekonomi**

Persoalan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting untuk menjamin kehidupan seorang anak sebab anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah perkahwinan tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Jika diperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia

maupun hukum Islam serta beberapa ketentuan tradisi adat di Malaysia mengatur bahwa tanggungjawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya akan di bebankan kepada orang tua laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Malaysia, lazimnya orang tua laki-laki (ayah) yang bertanggungjawab dalam memberikan biaya nafkah kepada keluarga maupun anak karena pada umumnya kaum lelakilah yang bekerja dan mencari nafkah. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggungjawab. Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat bahwa orang tua laki-laki (ayah) yang lazimnya mencari nafkah, maka biaya anak setelah terjadi perceraian adalah merupakan tanggungjawab orang tua laki-laki (ayah)<sup>72</sup>

Seperti yang terjadi di Sandakan Sabah ini, putusan Mahkamah Rendah Syariah telah memutuskan agar seorang ayah membayar biaya nafkah terhadap anak. Akan tetapi meskipun biaya nafkah anak telah diputus di Mahkamah Syariah, pada kenyataannya tidak semua orang tua laki-laki (ayah) mematuhi isi putusan mengenai biaya nafkah anak tersebut. Adapun yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya isi putusan Mahkamah Syariah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya seorang ayah itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kebanyakan berpenghasilan kecil. Sehingga seorang itu tidak dapat menunaikan tanggungjawabnya<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Siti Norbedta Chin Abdullah ( Kerani Pendaftaran ), *wawancara*, Tgl 30 April 2011

<sup>73</sup> Jamilah (ibu), *wawancara*, Tgl 30 April 2011



Hasil wawancara penulis bersama ayah (Shamsul) dia mengatakan bahwa dia tidak membayar nafkah karena ekonomi tidak kukuh dengan penghasilan yang sedikit, dia juga mengatakan bahwa dia tidak mempunyai pekerjaan tetap.

## **2. Faktor Orang Tua Menikah Lagi**

Setelah terjadi perceraian, baik pihak suami atau isteri yang telah bercerai berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin dalam putusan Mahkamah Syariah yang memutus perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi dalam hal seorang ayah yang menikah lagi, maka akan sulit bagi ayah tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak, kecuali ayah tersebut sangat berkecukupan secara financial atau seorang ayah tersebut mampu dari segi ekonomi. Dari hasil wawancara bersama ayah, dia mengatakan dia tidak berkecukupan dan berkemampuan atas tuntutan mantan istri karena dia berpenghasilan kecil untuk menanggung dua keluarga<sup>74</sup>.

Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi ayah tersebut, dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini juga akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian ayah dalam memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu. Karena seorang ayah harus

---

<sup>74</sup> Khalid (bapak), wawancara, Tgl 30 April 2011.

membiayai keluarganya yang baru, ia menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terdahulu.

Apa yang terjadi dalam masyarakat di Sandakan Sabah ini, seorang ayah tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah anak disebabkan ayah telah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru dan membutuhkan biaya nafkah pula untuk membiayai keluarganya yang baru. Dalam hal ini, seorang ayah sangat sulit untuk menyisihkan penghasilannya untuk guna memberikan biaya nafkah anak dari perkawinan sebelumnya.

Apabila suami menikah lagi, seorang suami beranggapan mereka tidak perlu membayar nafkah karena mereka ini mempunyai keluarga baru. Ada segelintir isteri baru tidak membenarkan suami membayar nafkah terhadap anak. Ini disebabkan beberapa faktor seperti wang yang tidak mencukupi untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga atau karena cemburu<sup>75</sup>.

Ada juga yang mengatakan tentang alasan tidak diberikannya biaya nafkah anak ini, karena isteri baru tidak membenarkan suami memberi duit belanja pada anak-anak. Karena bagi mereka bila ada anak yang baru, sukar untuk melaksanakan tanggungjawab karena sudah ada keluarga baru sehingga ayah tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah.

---

<sup>75</sup> Laila (ibu), *wawancara*, Tgl 30 April 2011.

### **3. Faktor psikologis**

Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut tidak dapat diterima oleh seorang istri. Bagi seorang istri, suami ataupun ayah adalah nakhoda rumah tangga, yang perlu bijak mengemudikan bahtera keluarganya dalam kehidupan yang serba mencabar ini. Justeru itu, tidak mudah bagi seorang istri untuk mengalas tanggungjawab sebagai seorang ayah atau ibu dalam satu masa. Inilah menjadi tekanan bagi seorang istri.

Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anak.

Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada ibu. Karena alasan-alasan tertentu, seorang ibu kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis seorang ibu. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam perkawinan suami melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan seorang ibu sebagai pemegang hak

pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan seorang suami atau ayah tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Keadaan ini ditemukan pula dalam masyarakat di Sandakan Sabah<sup>76</sup>. Faktor psikologis ini terjadi pada anak, di mana anak tertekan dengan sikap ibubapa mereka yang pentingkan diri sendiri. Anak menjadi mangsa dalam perceraian ini. Bila meningkat dewasa, segala keperluan anak makin meningkat. Seorang ayah yang ingkar dan lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah.

Dari wawancara penulis bersama ayah (kamal) dia mengatakan bahwa dia tidak mau memberikan biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis seorang ayah yang menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh mantan isterinya. Akibatnya seorang ayah menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya. Dia mengatakan bahwa mantan istri sakit hati sehingga tidak membenarkan saya melihat anak-anaknya<sup>77</sup>.

#### **4. Faktor Pemahaman Agama**

Seorang ayah seharusnya menjalankan tanggungjawab sebaiknya yaitu memberikan nafkah kepada anak-anak kerana anak adalah amanah Allah. Segelintir

---

<sup>76</sup> Puan Nuria binti Salleh ( pembantu syariah ( MAL), *wawancara*, Mahkamah rendah syariah Sandakan Sabah, Tgl 30 April 2011.

<sup>77</sup> Kamal (ayah),*wawancara*, Tgl 30 April 2011.

suami atau ayah enggan membayar nafkah anak-anak kerana kurangnya kesedaran agama dan mereka secara sengaja cuba mengabaikan tanggungjawab sedangkan zuriat adalah amanah Allah.

Meskipun hal ini ditegaskan dalam al-Quran, sayangnya manusia masih tidak pernah takut dan ingkar perintah Allah. Seorang suami atau ayah sanggup melupakan member tanggungjawab terhadap darah daging sendiri. Hubungan antara ayah dan anak umpama air yang dicincang tidak akan putus. Bercerai tidak membebaskan ayah daripada tanggungjawab memenuhi semua kebutuhan anak-anak.

### **C. Analisis Hukum Islam**

Islam telah menetapkan bahawa tanggungjawab menyediakan nafkah diserahkan kepada ayah. Hal ini bersesuaian dengan fitrah ayah sebagai lelaki yang mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan wanita. Ini adalah kewajiban dan tanggungjawab ayah. Sekiranya nafkah terhadap anak tidak dibayar semasa dalam tempoh yang sepatutnya, ianya akan menjadi suatu hutang yang tertanggung ke atas ayah untuk menjelaskannya.

Oleh sebab itu, ayah yang sihat dan waras adalah wajib menunaikan tanggungjawab ini dengan sempurna dan tidak boleh dikecualikan sama sekali. Ia harus berusaha bersungguh-sungguh supaya anaknya mendapat nafkah yaitu makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan termasuk juga perbelanjaan perubatan, dan seumpamanya.

Perlu difahami bahawa nafkah yang diterima oleh anak adalah sebagai hak. Dengan erti kata lain anak-anak berhak meminta sekiranya tidak diberi oleh ayah. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan tanggungjawab oleh ayah tentang nafkah akan mendatangkan keharmonian dan keberkatan dalam kehidupan kerana ia akan memberi nilai kepada anak bahawa ayahnya seorang yang bertanggungjawab.

Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan dalam kasus nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai, sejalan dengan apa yang diinginkan perspektif hukum Islam. Karena menurut hemat penelitian dalam penetapan tersebut Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan, sudah mempertimbangkan dengan adil dalam penetapan besarnya nafkah anak yang wajib dibayar oleh ayah.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa putusan dan wawancara peneliti lakukan di Mahkamah Syariah bersifat relative dalam menetapkan putusan nafkah anak, yang wajib dibayar oleh ayah. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam 2 (dua) bentuk salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan yang telah dipaparkan di atas, yaitu :

- a. “Salinan Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah : (KES MAL NO 12002-024-0120 THN 2010) bahwa Nurdin bin Arifin (defenden) tidak membayar nafkah terhadap anaknya setelah berlaku penceraian. Sebelum diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah plaintif (Asinah binti Daning) telah menuntut nafkah anak sebanyak RM450 sebulan tetapi defenden tetap tidak membayar nafkah terhadap anak. Sehingga

hakim memutuskan agar defenden membayar nafkah sebanyak RM450 sebulan secara tunai.<sup>78</sup>

- b. “Salinan Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah : (KES MAL NO 12002-024-0573 THN 2010) bahwa Mohamad Yusuf Bin Ali (defenden) tidak bayar nafkah anak sehinggalah plaintiff ( Zainab binti Sidun ) mengajukan kembali ke pengadilan. Plaintiff menuntut nafkah anak sebanyak RM300 sebulan dan nafkah isteri sebanyak RM150 sebulan tetapi sudah 3 bulan defenden tidak membayar nafkah. Karena defenden tidak mampu pendapatannya tidak mencukupi. Defenden hanya sanggup memberi nafkah anak sebanyak RM200 dan nafkah isteri RM50 karena defenden tidak mempunyai pendapatan lain. Maka atas persetujuan bersama mahkamah perintahkan defenden membayar nafkah anak RM200 secara tunai, setiap tanggal 1. Manakala defenden membayar nafkah isteri sebanyak RM50 sebulan secara tunai setiap tanggal 1.”<sup>79</sup>

Dua bentuk salinan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah di atas, merupakan dasar penelitian dalam menyimpulkan bahwa pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah terhadap anak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam,

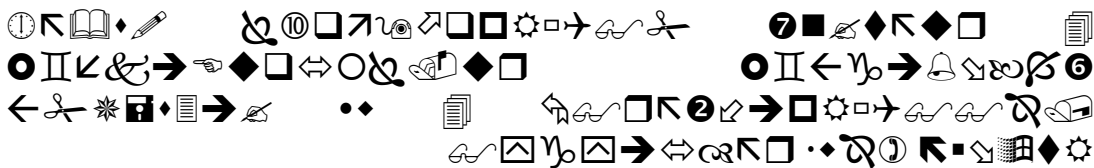
---

<sup>78</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah, KES MAL NO 12002-024-0120 THN 2010, 16 Mac 2010.

<sup>79</sup> Salinan Putusan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah, KES MAL NO 12002-024-0573 THN 2010, 06 Jun 2010

diantaranya mengedepankan azas keadilan dan menghindari tindakan penganiayaan (penzaliman).

Oleh karena itu, Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah telah menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya, yang menetapkan hak nafkah yang wajib dibayar oleh ayah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Dan tanpa mengabaikan hak yang harus diterima oleh anak setelah berlakunya penceraian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : ayat 233



*Dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara Yang sepatutnya. tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya<sup>80</sup>.*

Dalam hadis juga ada mengatakan bahwa ayah wajib memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya seperti dalam sabda Nabi S.A.W :

دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله , ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني , ما اخذت من ما له بغير علمه , فهل على في ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) متفق عليه

*Dari `Aisyah, katanya: Hindun puteri `Uthbah yang menjadi isteri Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah SAW kemudian ia berkata. “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup bagi diriku dan anak-anakku, sehingga aku harus mengambil hartanya tanpa pengetahuannya. Adakah aku boleh melakukan hal tersebut?”Nabi bersabda. “ambillah dengan cara baik dari hartanya itu sekadar mencukupi diri dan mencukupi anakmu. (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>81</sup>.*

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.817.

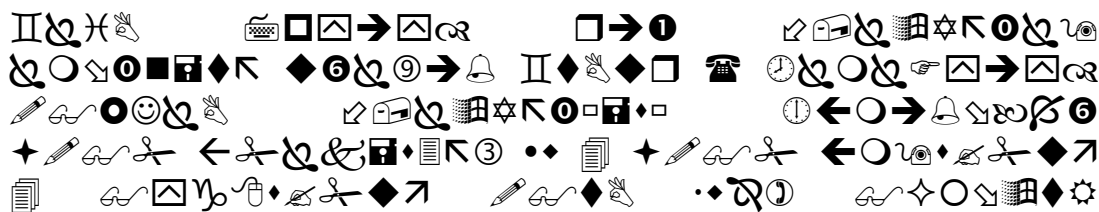
<sup>81</sup> M.Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), cet-1, h.426.



Ayat-ayat di atas, menunjukkan ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anak karena mereka masih berada dalam keadaan yang lemah. Allah meletakkan kewajiban memberi nafkah kepada ayah karena ayah adalah orang yang terdekat dengan anaknya dan yang wajib menyayangi anaknya. Ayat ini juga menyatakan bahawa adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anak, tidak kira sama ada anak-anak itu di bawah jagaannya atau orang lain.

Lelaki adalah insan hebat yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam institusi kekeluargaan, lelaki memainkan peranan penting memastikan keharmonian keluarga, kesejahteraan dan hala tuju keluarga dalam mencapai matlamat hidup yang sempurna dan bahagia. Bersesuaian dengan firman Allah dalam al-Quran yang mengatakan ‘Lelaki itu adalah pemimpin terhadap perempuan’ (Surah al-Nisa : 34)<sup>82</sup>

Dalam memberikan nafkah kepada keluarga, ayah perlu melakukannya dengan bi al-ma’ruf yaitu dengan cara yang baik ataupun makruf, sesuai dengan keadaan ataupun kemampuannya. Dia mungkin orang kaya ataupun orang miskin. Allah telah menjelaskan dalam firmanNya :



<sup>82</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ( Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002),h.108.



*Hendaklah orang Yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa Yang di sempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa Yang diberikan Allah kepadanya (sekadar Yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) Yang diberikan Allah kepadaNya. (orang-orang Yang Dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan<sup>83</sup>.*

Berdasarkan perintah Allah itu, Imam Maliki membuat kesimpulan, ayah boleh mengupah perempuan yang bukan ibu kepada anaknya dengan tujuan menyusukan anaknya, memberikan makanan dan pakaian kepadanya. Abu Hanifah juga memiliki pendapat yang sama tetapi anak-anak muridnya mempunyai pendapat yang berbeza. Mereka mengatakan perbuatan mengupah seperti itu tidak termasuk majhulah yaitu tidak diketahui dan dengan itu kita tidak boleh melakukannya.

Seorang ayah wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat :

1. Bahawa anak itu belum boleh berdikari. Bagi anak perempuan sehingga ia berkahwin atau sehingga ia ada pekerjaan.
2. Bahawa anak itu miskin tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahkanya.
3. Ayah itu mampu memberi nafkah.

Berdasarkan pendapat Fuqaha, maka ayah wajib memberi nafkah untuk keperluan perbelanjaan seharian dan pembelajaran dan lain-lain keperluan mereka. Imam Syafi'I juga berkata seorang suami berkewajiban member nafkah kepada anak-

---

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.817.

anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya kecuali bila ia memberikannya secara sukarela.

Manusia mudah lupa, justeru tidak salah kita saling mengingatkan antara satu sama lain, mengenai tanggungjawab yang harus dipikul oleh bapa demi kesejahteraan keluarga dan negara. Harus juga diingat bahawa keharmonian keluarga adalah asas kesejahteraan masyarakat, negara dan umat manusia secara keseluruhan.

Isu kelalaian dan kecuaiannya bapak dalam memberikan nafkah kepada anaknya atau sengaja mengabaikannya hanya berlaku dalam masyarakat yang tidak mementingkan nilai kasih sayang dan tidak bertanggungjawab di dalam menunaikan kewajibannya. Oleh sebab itu, tuntutan dan penetapan nafkah anak yang diatur dalam Islam amat sempurna, rasional dan wajar dipatuhi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diadakan pembahasan dan penguraian tentang Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Pada Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah, maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah pada nafkah anak setelah perceraian masih tidak dapat dilaksanakan bapak yang telah diputuskan oleh mahkamah. Bagi bapak yang tidak melaksanakan putusan mahkamah, maka mahkamah akan mengeluarkan surat amaran sehinggalah kasus tersebut didaftarkan semula. Sekiranya bapak masih lagi gagal dalam melaksanakan putusan tersebut, hakim akan menjatuhkan hukuman penjara dan menyita harta ayah.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan dalam kasus nafkah anak setelah perceraian seperti berikut :
  - a. Meskipun biaya nafkah anak telah diputuskan oleh mahkamah. Pada kenyataannya tidak semua ayah bisa memenuhi isi putusan tersebut atas faktor-faktor tertentu antaranya faktor ekonomi karena ayah tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kebanyakannya berpenghasilan kecil.
  - b. Faktor ayah tidak membayar nafkah karena ayah telah mempunyai keluarga baru. Dalam hal ini sangat sulit untuk ayah menyisihkan

penghasilannya untuk diberikan kepada anak dari perkawinan sebelumnya lantaran ada keluarga baru.

- c. Antara faktor lain adalah faktor psikologis, seorang ibu mempunyai perasaan sakit hati dan tertekan sehingga tidak mengizinkan mantan suami bertemu anak mereka. Manakala dari aspek psikologis seorang ayah pula menganggap bahwa biaya nafkah anak-anak tersebut akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh mantan istrinya, karena hal inilah ayah tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anak setelah perceraian. Seterusnya faktor psikologis yang terjadi pada anak dimana anak tertekan dengan sikap ibubapa yang pentingkan diri sendiri.
  - d. Faktor lain adalah faktor pemahaman agama bagi seorang ayah. Kurangnya didikan agama menyebabkan seorang ayah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah. Sedangkan mereka tahu zuriat itu adalah amanah dari Allah.
3. Islam mewajibkan kepada ayah untuk melaksanakan nafkah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya serta tanpa mengabaikan yang harus diterima oleh anak setelah berlakunya perceraian, sama ada dari segi pangan, sandang dan tempat tinggal.

## **B. Saranan**

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini dengan segala usaha, kemampuan dan pengetahuan, maka berikut adalah beberapa saranan yang penulis rasa perlu diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkaitan antaranya :

1. Bagi ayah hendaklah memenuhi kewajiban melaksanakan nafkah anak setelah perceraian yang telah ditetapkan oleh syara'.
2. Bagi pihak Mahkamah Rendah Syariah agar mengembalikan fungsi mahkamah sesuai dengan fitrah Islam, dan bertindak tegas dalam mengadili setiap kasus yang ada di tengah masyarakat. Berbagai pihak terpentingnya Mahkamah Rendah Syariah Sandakan Sabah harus bersikap pro aktif tanpa menunggu laporan dari berbagai pihak.
3. Hukum Islam yang sedia ada diimplimentasikan sepenuhnya dalam mengadili perkara yang berkaitan nafkah anak setelah perceraian, aplikasi mahkamah syariah harus sejalan dengan hukum Islam agar peranan mahkamah syariah bertetapan dengan al-Quran as-Sunnah.

## DAFTAR PUSATAKA

Abd Rahman, Ghazali, Syeikh *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, (Malaysia : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,1997),

Ad-Damasiqi, Ibnu Katsir, Abul Fida, Al-Imam *Tafsir Al-Quranul Adzim*,”Terj. Bahrin Abu Bakar dkk”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001 ), Jilid 1-2, Cet. 1

Ahmad, Bin, Mohd Saleh, *Perkahwinan dan Perceraian dalam Islam*, (Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid) Cet.1,2009.

Al-Jaziri, Rahman, Abdul, *Kitabul Fiqh ‘Ala Mazahibul Arba’ah*, (Mesir : Maktabul Tijariyatul Kubra, 1979), Jilid 4

Al-Khin, Mustofa, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Terjemah oleh : Ridzuan bin Hashim),(Kuala Lumpur : Pustaka Salam), Jilid 4.

Ayyub, Syaikh Hasan,*Fikih Keluarga*,( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2001 )

Az-Zabidi, Imam,*at-Tajrid al-shahili Ahadits al-Jami`*, ( Kairo : Dar el-Fikr, 2002 ),

Bayir, Azhar Ahmad *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, ( Bandung : Mizan,1993 )

Daradjat, Zakiyah dkk.*Agama Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang,1984 )

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet ke-1.

Effendi, Satria *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ( Jakarta : 2004 )

Enakmen undang-undang keluarga Islam Negeri Sabah, Tahun 2004

Hakim, Rahmat *Hukum Perkahwinan Islam*, (Bandung : CV.Pustaka Setia,2000), cet

1

Huzaemah, *Didik Anak Gaya Rasulullah*, (Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn Bhd)  
Cet 1,2010

Ibnu Ismail Al-Kahlani, As-Said Al Imam, *Subulus Salam*, (Bandung: Maktabah  
Dahlan), Jilid 3.

Idris ,Fatah, Abdul ,*Fikih Islam Lengkap*, ( Jakarta : PT.Rineka Cipta,2004 )

Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, (Terjemahan oleh : Imron Rosadi  
) , Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), Jilid 2.

Junaedi, Dedi *Keluarga Sakinah Pembinaan Dan Pelestariannya*, ( Jakarta :CV  
Akademika Pressindo, 2007.

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, al-Allamah, Syaikh ` *Fiqih Empat  
Mazhab*,( Terjemahan Oleh ` Abdullah Zaki Alkaf),( Bandung : Hasyimi  
press,2004),Cet Ke-2

Negeri Sabah,*Rang Undang-Undang*, ( Negeri Sabah : 2004 )

Nur, Djamaan,*Fikih Munakahat*,( Semarang : CV.Toha putra,1993 )

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, ( Bandung : Al-Ma`arif, 1994 )

Sahrani, Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat* (kajian fikih nikah lengkap),(Jakarta :  
Rajawali Pers,2009 )

Siti Zulaikha Mohd Noor, *Perlindungan Kanak-kanak Di dalam Islam  
Pelaksanaannya menurut Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur :  
Nurin Enterprise,1989)